
TUGAS AKHIR

**KANTOR KABUPATEN DATI II
MUSI BANYUASIN - SEKAYU
SUMATRA SELATAN**

Landasan Konseptual Perancangan



Oleh :

Ery Susandah

No. Mhs : 87340045

N I R M : 870051013116120043

**JURUSAN TEKNIK ARSITEKTUR
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

1994

Lembar Pengesahan

**KANTOR KABUPATEN DATI II
MUSI BANYUASIN - SEKAYU
SUMATRA SELATAN**

Oleh :

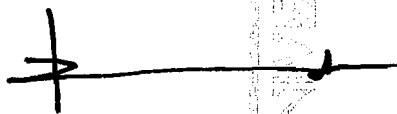
Ery Susandah

No. Mhs : 87340045

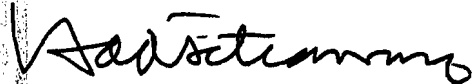
N I R M : 870051013116120043

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Pembantu



(Ir. Chuffran Pasaribu)



(Ir. Hadi Setiawan)

Mengesahkan

Ketua Jurusan Teknik Arsitektur

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta,



(Ir. H. Munichi BE Edrees, M.Arch)

**JURUSAN TEKNIK ARSITEKTUR
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

1994

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas selesainya penulisan tugas akhir ini dengan mengambil judul **Kantor Kabupaten Dati II Musi Banyuasin Sekayu Sumatera Selatan** yang merupakan persyaratan akhir untuk dapat meraih gelar sarjana Teknik Arsitektur di Fakultas Teknik Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Penulis ucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Ir. H Munichy B. Edress, M. Arch selaku Ketua Jurusan Teknik Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
2. Bapak Ir. Chuffan Pasaribu M S. selaku dosen pembimbing utama Jurusan Teknik Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
3. Bapak Ir. Hadi Setiawan, selaku dosen pembimbing Pembantu Jurusan Teknik Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
4. Bapak Ir. Ilya Fajar Maharika selaku dosen pembimbing pendamping Jurusan Teknik Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
5. Devi Susanti Simangunsong sebagai isteri tercinta yang telah mendampingi penulis dalam menyelesaikan tulisan ini.

-
6. Ayahnda dan Ibunda tercinta yang telah memberikan dorongan semangat moril dan do'a
 7. Kakak dan adik-adik serta rekan-rekan yang telah banyak membantu hingga terselesaikannya tulisan ini.
 8. Letkol Dr. Rahma Irfan yang telah memberikan dorongan moril dan materiil.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis persembahkan karya yang sederhana ini kepada almamater tercinta untuk dapat dijadikan sebagai acuan dasar bagi mahasiswa Jurusan Teknik Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Islam Indonesia Yogyakarta khususnya dan mahasiswa lain umumnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 April 1994

Ery Susandah



DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Abstraksi	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan	5
C. Tujuan dan Sasaran	6
D. Lingkup Pembahasan	7
E. Sistematika Pembahasan	7
BAB II PENJELASAN UMUM	
A. Dasar-dasar Pemerintahan Daerah Tingkat II	8
B. Pembentukan Dan Pengembangan Kota Administratif	11
C. Dasar Pengembangan Kota Sekayu	14
D. Penetapan Fungsi Bagian Berdasarkan Pengembangan Wilayah Kota Sekayu	18
E. Kebijakan Rencana Pengembangan Kependudukan Kabupaten Dati II Musi Banyuasin	20
F. Pusat Pemerintahan yang Menunjang Citra Kota	21
G. Pengembangan Kantor Kabupaten Dati II Musi Banyuasin	26



BAB III A N A L I S I S

A. Analisis Lokasi Pusat Pemerintahan

Kabupaten Dati II Musi Banyasin 33

B. Analisis Citra Pusat Pemerintahan

Kabupaten Dati II Musi Banyasin 38

C. Analisis Zonning, Site dan Lokasi

Bangunan Pusat Pemerintahan..... 50

D. Analisis Ruang Bangunan 51

E. Analisis Ungkapan Fisik Bangunan 63

BAB IV KONSEP PERENCANAAN DAN PERANCANGAN

A. Konsep Perencanaan 70

B. Konsep Perancangan 79

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

ABSTRAKSI

Pemerintahan dalam suatu negara pada hakekatnya terbentuk oleh satu bangsa dalam mencapai cita-citanya, demikian seperti yang terkandung dalam alenia IV Pembukaan UUD 1945. Seperti dijelaskan dalam GBHN, dalam rangka melancarkan pelaksanaan pemerintahan dibentuklah pemerintahan daerah.

Untuk itu daerah kabupaten Tingkat II Musi Banyuasin (Sumatera Selatan) masyarakatnya ingin lebih tumbuh dan berkembang terutama dalam kebutuhan hidupnya, yang mempunyai kepentingan terhadap kebijaksanaan-kebijaksanaan dan program-program (kegiatan/arahan pengembangan) dari pada pemerintahan seperti halnya permasalahan politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Hal ini tidak terlepas dari prinsipnya di dalam membutuhkan suatu wadah kegiatan tersebut atau sebagai fungsi penunjangnya.

Biasanya wadah ini dalam pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II menjadi satu kesatuan, maksudnya dari satu kesatuan di sini adalah unit-unit kerjanya yang sudah menjadi standar di dalam konsep pemerintahan daerah tingkat II, antara lain : Sekretariat daerah, Inspektorat Wilayah Kabupaten Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kantor Sosial Politik, Markas Komando Pertahanan Sipil dan Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan Pancasila (BP-7).

Permasalahan yang akan di atasi, sehubungan dengan masalah yang sifatnya arsitektural dan non arsitektural, sebagai contoh :

- Non Arsitektural (Soft Ware/Non Teknis)

Meningkatkan hasil guna dan daya guna dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka menunjang citra kota.

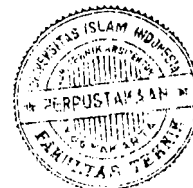
- Masalah Arsitektural (Hard Ware/Teknis)

- a. Bagaimana merencanakan suatu kompleks Pemerintahan Kabupaten Tingkat II Musi Banyuasin menjadi pusat orientasi warga kota baik secara simbolos maupun fungsional melalui ungkapan tata ruangnya.
- b. Bagaimana menampilkan bentuk fisik bangunan kantor Bupati sebagai salah satu prioritas utama wadah kegiatan Pemerintahan Daerah Tingkat II Musi Banyuasin yang sesuai dengan fungsi dan kedudukan dalam pelayanannya terhadap masyarakat sehingga memberikan citra sebagai pusat pemerintahan yang sebenarnya.

Pada pembahasan ditinjau dari skala lingkungan kota yang memperhatikan faktor fungsi dan faktor psikologis (interaksi manusia dan lingkungan). Porsi pada pembahasan terbesar pada design bangunan kantor bupati dalam kaitannya terhadap tata ruang pusat pemerintahan (lay out ruang.)

Di dalam konsep perencanaan dan perancangan nantinya disesuaikan dengan permasalahan yang akan dihadapi tersebut di atas, misalkan :

- Konsep perencanaan yang meliputi : Pemilihan lokasi, penentuan luas site/luas tapak ruang utama, luas ruang penunjang, luas tapak bangunan seluruhnya dan sebagainya.
- Konsep perancangan yang meliputi : Gubahan tata ruang pola hubungan ruang dan besaran ruang serta pengelompokan yang berdasarkan hubungan frekwensi yang erat sehingga dapatlah diharapkan suatu penampilan bangunan yang lebih konsisten berdasarkan kebutuhan ruang-ruang yang semestinya.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suatu pemerintahan daerah adalah sebagian dari pada bentuk suatu pemerintahan negara yang mempunyai daerah otonom dan di dalam penyelenggaraannya berdasarkan azas desentralisasi dan dekonsentrasi.

Yang dimaksud dengan desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintahan atau tingkat atasnya kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya. Dan maksud dari dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah atau kepala wilayah atau kepala instansi vertikal tingkat atasnya kepada pejabat-pejabatnya di daerah. Untuk itu, setiap warga negara akan mengetahui dimana kedudukannya, apa hak dan kewajibannya di dalam kehidupan bernegara.

Sebagai fasilitas berlangsungnya pemerintahan di daerah maka kantor Kabupaten Daerah Tingkat II mempunyai tujuan dan fungsi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang dipimpin oleh seorang bupati kepala daerah.

Agar pemerintahan di daerah dapat berlangsung diperlukan unsur-unsur management yang akan melayani masyarakat secara administratif maupun operasional. Kemudian untuk memperoleh efisiensi kegiatan kerja, pelayanannya perlu didukung oleh organisasi pemerintahan, personil, peralatan dan wadah kegiatan yang efisien. Susunan dan pembentukannya harus disesuaikan dengan UU No.5/Th 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah, yang disesu

aikan dengan Pasal 4 Bab III mengenai daerah otonom yang berbunyi bahwa : "Daerah dibentuk dengan memperhatikan syarat-syarat kemampuan ekonomi, jumlah penduduk, luas daerah, pertahanan dan keamanan nasional dan syarat-syarat lain yang memungkinkan daerah melaksanakan pembangunan, pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab".

Demikian pula halnya dengan Kota Sekayu-Kabupaten DT II Musi Banyuasin, didalam perkembangannya hingga saat ini memiliki fungsi dan perananan yang sangat penting, yaitu sebagai berikut :

- a. Pusat pemerintahan tingkat kabupaten dan sebagai Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin.
- b. Pusat Utama Wilayah Pembangunan (WP)C dan Sub Pusat Utama Wilayah Pembangunan (WP) Sekayu dalam sistem pewilayahan Sumatera Selatan, Wilayah Pembangunan Sekayu dengan pusatnya di kota Sekayu meliputi sebagian Daerah Tingkat II Musi Banyuasin.
- c. Pusat Utama BWK C.
- d. Pusat distribusi barang dan jasa Kabupaten DT II Musi Banyuasin.
- e. Pusat penyediaan dan pelayanan fasilitas sosial, ekonomi dan budaya,
- f. Pusat pelayanan transportasi.

Fungsi dan peranan tersebut diatas merupakan potensi utama bagi pembangunan dan perkembangan kota Sekayu-Kabupaten DT II Musi Banyuasin. Hal ini karena semua kegiatan penting seperti : pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa, industri, transportasi dan fasilitas pelayanan umum dalam skala lokal berpusat di kota Sekayu-Kabupaten DT II Musi Banyuasin. Namun demikian, hal ini sekaligus juga merupakan faktor penarik utama bagi penduduk untuk berurbanisasi ke kota Sekayu-Kabupaten DT II Musi Banyuasin.

Adanya berbagai karakteristik dari kegiatan-kegiatan tersebut diatas akan sangat mempengaruhi perkembangan struktur tata ruang kota, seperti : meningkatnya kegiatan komersial kota, perkembangan pemukiman baru dan kebutuhan fasilitas pelayanannya, kebutuhan perluasan, sistem jaringan transportasi, meningkatnya kegiatan perdagangan, perkantoran yang selanjutnya membutuhkan areal pengembangan baru atau terjadinya intensifikasi penggunaan tanah di beberapa kawasan tertentu dan lain-lain.

Hal ini selanjutnya akan mempengaruhi bentuk dan struktur kota Sekayu-Kabupaten DT II Musi Banyuasin di masa yang akan datang. Dengan demikian agar perkembangan fisik kota Sekayu-Kabupaten DT II Musi Banyuasin dapat menjadi wadah pelayanan optimal bagi terselenggaranya segenap kegiatan penduduk kota maupun daerah belakangnya/daerah pengaruh, maka diperlukan adanya pengarahan dan pengendalian kota secara bertahap dan opera-sional.

Disisi lain, Pemerintahan Daerah Tingkat II Musi Banyuasin telah merencanakan juga untuk meningkatkan status dari kota Sekayu, dari Kabupaten DT II (Kota Administratif) menjadi Kota Madya. Kebijakan ini tentu akan memberikan implikasi yang luas terhadap perkembangan dan pengembangan kota Sekayu dimasa datang, baik dari segi rung fisik maupun fungsi dan peranan kotanya. Menghadapi berbagai implikasi yang akan muncul sebagai akibat peningkatan status kota Administratif Sekayu menjadi Kota Madya, maka gagasan pemerintahan Daerah Tingkat II Musi Banyuasin untuk memindahkan Ibukota Kabupatennya dari wilayah yang berorientasi disepanjang aliran sungai Musi (sebelah selatan Kota Sekayu yang lama / BWK C), ke Ibukota Kecamatan Sekayu, juga merupakan Ibukota DT II Musi Banyuasin yang terletak di bagian utara Ibukota Propinsi Tingkat I Sumatera Selatan (Palembang).

Dalam hal ini dapat dinilai sebagai langkah yang tepat dan strategis. Untuk kemudian Ibukota Kabupaten ini akan mendukung penanggulangan berbagai permasalahan kota Administratif Sekayu dan memberi keleluasaan bagi pengembangan dirinya menjadi Kotamadya (dimana sebagian Ibukota Kabupatennya dapat mempersilakan wilayahnya). Dengan pemindahan Ibukota Kabupaten tersebut berarti sebagian beban fisik dan beban fungsi Kotanya akan dialihkan. Dan ibukota kabupaten yang baru diharapkan dapat mewujudkan suatu pengakuan umum dari masyarakat, yang akan menduduki dan menumbuhkan " Citra " pusat pemerintahan yang sebenarnya.

Situasi di atas sekaligus dijadikan alasan pemerintahan Daerah Tingkat II Musi Banyuasin untuk memindahkan semua pasilitas fisik penunjang kawasan pusat pemerintahan ke kota " Baru " ibukota kecamatan Sekayu. Salah satunya fasilitas fisik yang menjadi prioritas utama kegiatan pemerintahan adalah kantor Bupati Kepala Daerah Tingkat II Musi Banyuasin, yang sebagai wadah pelaku fungsi eksekutif. Kantor bupati ini harus dapat menampilkan satu identitas fisik sesuai kedudukannya yang tertinggi dalam fungsi pelayanan terhadap masyarakat wilayah Kabupaten DT II Musi Banyuasin, sehingga apa yang diharapkan dapat mendukung dan menumbuhkan 'citra' pusat pemerintahan yang sebenarnya.

B. PERMASALAHAN

I. Non Arsitektural (soft ware/non teknis)

Bagaimana meningkatkan hasil guna dan daya guna dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka menunjang citra kota.

II. Arsitektural (hard ware/teknis)

- Bagaimana merencanakan/merancang suatu kompleks pemerintahan Kabupaten DT II Musi Banyuasin menjadi pusat orientasi warga kota baik secara simbolis maupun fungsional, melalui ungkapan tata ruangnya.
- Bagaimana menampilkan bentuk fisik bangunan kantor bupati sebagai salah satu prioritas utama wadah kegiatan pemerintahan DT II Musi

Banyuasin yang sesuai dengan fungsi dan kedudukannya dalam pelayanan terhadap masyarakat, sehingga dapat memberikan citra sebagai pusat pemerintahan yang sebenarnya.

C. TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan

Memberikan alternatif design kantor pemerintahan Ibu Kota sekayu-Kabupaten DT II Musi Banyuasin di dalam pembangunan kawasan baru yang sedang dilaksanakan sesuai dengan Perda setempat, kedalam suatu uraian proses perancangan fisik yang didasarkan pada pengkajian kondisi yang ada.

2. Sasaran

- Mencoba merumuskan cara untuk memberikan citra kota Sekayu-Kabupaten DT II Musi Banyuasin, melalui suatu analisa dan studi lokasi pusat pemerintahan khususnya dari faktor kondisi fisik dan lingkungannya.
- Menyusun konsep perencanaan dan perancangan tata ruang pusat pemerintahan Kabupaten DT II Musi Banyuasin di Sekayu dengan fasilitas kantor bupatinya, atas dasar fungsi dan peran terhadap kota.



D. LINGKUP PEMBAHASAN

- Pembahasan ditinjau dari skala lingkungan kota (kompleks pusat pemerintahan) yang sebelumnya dibahas secara selintas dari skala regional (kaitannya dengan Propinsi Sumsel) dan skala kota baru sesuai dengan perencanaan kawasan yang sedang dilaksanakan (Ibu Kota Sekayu).
- Porsi pembahasan terbesar adalah pada design bangunan kantor bupati dalam kaitannya terhadap optimalisasi tata ruang pusat pemerintahan.

E. SISTEM ATIKA PENULISAN

Tata urutan penulisan yang digunakan adalah sebagai berikut :

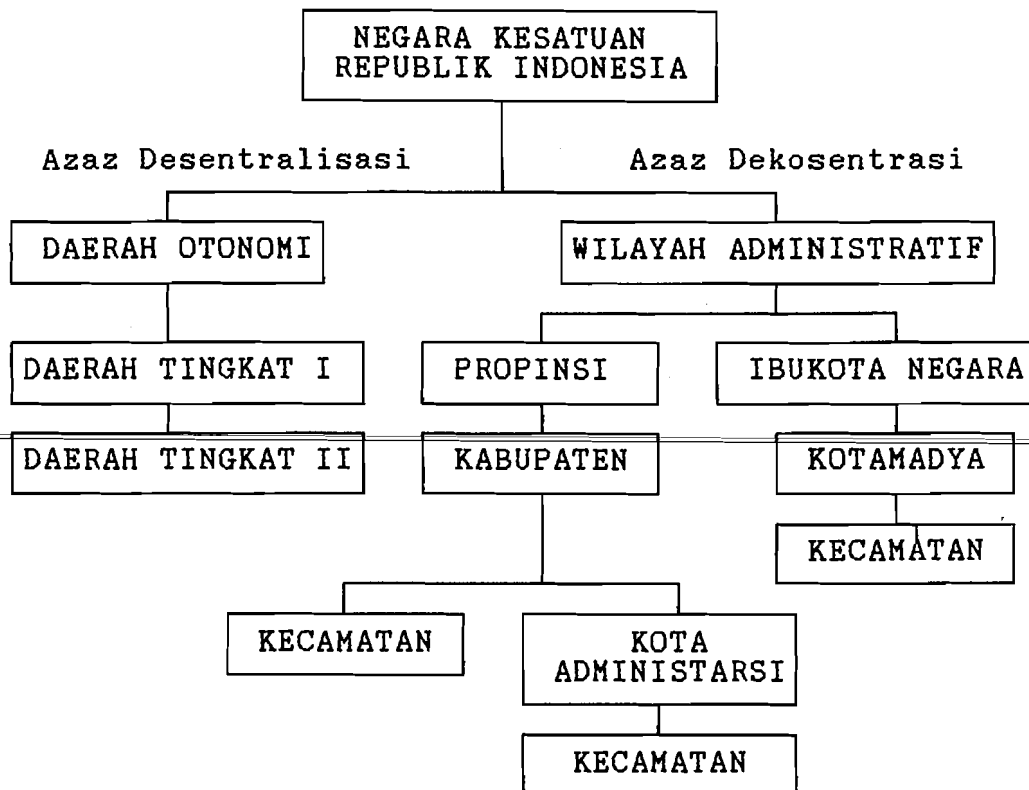
- Bab I. Pendahuluan, yaitu memberi gambaran tentang latar belakang permasalahan yang dihadapi, serta hal-hal yang berkaitan dengan tata cara penulisan.
- Bab II. Penjelasan Umum, menjelaskan tentang program-program pemerintahan yang berkaitan dengan permasalahan, batasan-batasan yang digunakan dalam perencanaan serta dasar teori yang menunjang analisis,
- Bab III. Analisis, membahas kaitan antara program pemerintahan dan batasan perencanaan yang ada (terutama dari faktor kondisi fisik dan lingkungan) dengan masalah arsitektur.
- Bab IV. Konsep Perencanaan dan Perancangan merupakan kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan.

BAB II

PENJELASAN UMUM

A. Dasar-dasar Pemerintahan Daerah Tingkat II

Menurut UU RI No 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di Daerah, 1) daerah di Indonesia dibentuk berdasarkan azas desentralisasi dan desentralisasi. Sebagai realisasinya, di daerah terdapat dua jenis pemerintahan, yaitu pemerintahan yang bersifat administratif (azas desentralisasi) dan pemerintahan yang bersifat otonomi (azas desentralisasi).



Skema pembagian Wilayah 2)

1) Pendahuluan UU RI No. 5 Tahun 1974

2) Markus Sugiharjo, Thesis, Jurusan FT UGM, 1978

Berdasarkan azas Desentralisasi, Pemerintah Daerah Tingkat II mempunyai hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. 3) yang dimaksud Pemerintah Daerah Tingkat II disini adalah Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang dalam menyelenggarakan pemerintahan Daerah dibentuk sekretariat Daerah dan Dinas-dinas Daerah. 4)

Kepala Daerah sebagai pemegang kekuasaan eksekutif dan DPRD sebagai pemegang kekuasaan legeslatif, dibentuk oleh staf administrasi serta Dinas-dinas Daerah, Secara bersama-sama menjalankan fungsi pemerintahan daerah, a.l.: 5)

- Fungsi keamanan dan ketertiban, yakni fungsi pemerintahan untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban umum agar keseluruhan proses pembangunan dapat terlaksana.
- Fungsi keamakmuran dan kesejahteraan, yakni mengantarkan rakyat pada suatu taraf kemakmuran dan kesejahteraan lahir dan batin melalui perancangan dan program-program disegala bidang.
- Fungsi Administrasi, mempunyai pengertian dan maksud untuk mengefektifkan dan mengefesiensikan usaha pembangunan yang dilakukan.

Selain kedua unsur dasar Pemerintahan Daerah Tingkat II di atas, Terdapat Dinas-dinas Vertikal di daerah yang merupakan tangan-tangan kerja pemerintah Pusat, baik dari unsur Departemen maupun Non Departemen.

3) Pasal 7 UU RI No 5 Tahun 1974

4) Pasal 13 UU Ri No 5 Tahun 1974

5) Penjelasan UU RI No 5 Tahun 1974

Dalam tata kerja, Kepala Daerah yang sekaligus merangkap sebagai Kepala Wilayah/Bupati, harus selalu memonitor dan mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan program instansi-instansi vertikal tersebut, sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku. 6) Khusus menyangkut hubungan tata kerja antara kepala Daerah dengan DPRD . masing-masing tidak bertanggung jawab, akan tetapi kepala Daerah harus memberikan keterangan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan pemerintahan Daerah, agar DPRD selalu dapat mengikuti dan mengawasi jalannya Pemerintahan Daerah .

Sedang dalam menjalankan hak, wewenang dan kewajiban sebagai pimpinan Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Wakil Kepala Daerah serta instansi-instansi yang berkaitan, yaitu : 7)

- Badan pertimbangan Daerah, yang bertugas untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Daerah.
- Sekretariat Daerah, yaitu unsur staf yang membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemerintah Daerah.
- Dinas-dinas Daerah, sebagai unsur pebagai unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah.
- Perusahaan Daerah, merupakan unsur pelaksana Pemerintahan Daerah terutama bergerak dalam usaha menambah penghasilan Daerah.

5) *Penjelasan UU RI No 5 Tahun 1974*

6) *idem*

7) *ibid*

- Inspektorat Wilayah Kabupaten, merupakan perangkat pengawasan umum yang diperbantukan kepada Bupati/kepala daerah Tingkat II dalam kedudukannya sebagai kepala Wilayah.
- Badan perencanaan pembangunan Daerah (Bappeda), merupakan staf yang langsung dan bertanggung jawab pada Bupati dalam menentukan kebijaksanaan dibidang perencanaan dan pembangunan, serta penilaian dan pelaksanaannya.
- Kantor Sosial dan Politik Kabupaten, adalah aparat departemen Dalam negeri yang diperbantukan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II untuk menangani masalah-masalah sosial politik di Kabupaten.
- Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan pengamalan Pancasila (BP7), yaitu lembaga pemerintahan yang diperbantukan kepada Bupati untuk melaksanakan pembinaan, pendidikan, pelaksanaan, pedoman dan penghayatan dan pengamalan pancasila.
- Markas Wilayah Pertahanan Sipil (Manwil Hansip), merupakan pertahanan non militer yang integral dengan sistem pertahanan keamanan Nasional. Mempunyai tugas perencanaan, mempersiapkan, menyusun, serta mengarahkan potensi rakyat dalam bidang perlindungan masyarakat.

B. Pembentukan dan Pengembangan Kota Administratif.

Dalam UU RI No 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, pasal 72 ayat (4) dinyatakan :

" Apabila dipandang perlu sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangannya, dalam Wilayah Kabupaten dapat dibentuk kota Administratif yang pengaturannya ditetapkan dengan



peraturan Pemerintah". Berdasarkan bunyi Undang-Undang tersebut, dan sebagai penerapan azas dekosentrasi, dimungkinkan pembentukan Kota Administratif dan sekaligus mengembangkannya.

Pembentukan dan Pengembangan Kota Administratif, menurut 'Kebijaksanaan Departemen Dalam Negeri dibidang Pembinaan Perkotaan di Indonesia', merupakan langkah pemulaan untuk memberikan pengalaman pada kota-kota dalam pengembangan diri sendiri menuju status kota yang lebih tinggi, yaitu kota otonomi (Kotamadya Daerah Tingkat II). Hal tersebut tidak perlu ditafsirkan bahwa kota-kota Administratif secara otonomis akan meningkat menjadi Kotamadya, tetapi peningkatan status tetap tergantung pada kemampuan kota. Ada kemungkinan suatu kota administratif tidak mampu berotonomi, walaupun sudah cukup lama berstatus kota Administratif. Dalam hal yang demikian, kota tersebut harus tetap berstatus Kota Administratif dan perlu ditinjau lagi status Administratifnya. Pada kota Administratif yang telah dinaikan statusnya menjadi Kotamadya biasanya akan menghadapi dilema tentang ibukota pemerintahannya.

Ditinjau dari fungsinya, ibukota merupakan pusat kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Masing-masing kegiatan tersebut saling berkaitan dan menunjang. Kegiatan pemerintahan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Aparatur Pemerintahan dalam rangka pelayanan dan usaha pembangunan, yang didukung oleh kegiatan kemasyarakatan. Fungsi ibukota yang demikian bergerak secara dinamis, dalam hal ini pemerintahan

merupakan bagian yang paling dominan dalam ide dan pelaksanaannya, karena di dalamnya terdapat kegiatan pengurusan berbagai kegiatan pengurusan berbagai kepentingan masyarakat.

Baik Kotamadya maupun ibukota Kabupaten, keduanya merupakan pusat-pusat kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan dalam wilayah kotamadya dan kabupaten yang bersangkutan. Sehingga untuk bisa diharapkan pertumbuhan masing-masing, perlu dipikirkan usaha pengembangan ibukota secara terpisah antara kotamadya dan kabupaten. 8) Pembentukan atau pemindahan ibukota harus tetap mempertimbangkan tiga fungsi utama ibukota yang telah disebutkan, agar dapat menjamin efisiensi dan arah pertumbuhan sesuai dengan kondisi daerah yang bersangkutan.

Menurut pasal 4 UU RI No 5 Tahun 1974, perubahan nama dan pemindahan ibukota daerah ditetapkan dengan peraturan pemerintah. 9) Jelaslah bahwa pemindahan ibukota kabupatenpun harus ditetapkan dengan peraturan pemerintah/peraturan Daerah setempat. Dan memang harus diakui bahwa pemindahan suatu ibukota merupakan suatu proses kegiatan yang memakan waktu lama, selain biaya yang besar.

8) Prof. Drs. S. Pamuji MPA, *Pembinaan Perkotaan di Indonesia*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1985, Hal 35.

9) *Penjelasan UU RI No 5, Tahun 1974.*

C. Dasar Pengembangan Kota Sekayu

Pada prinsipnya kota-kota di Indonesia mulai memperlihatkan kecenderungan berkembang terutama sejak tahun 1950-an. Banyak pendapat yang mengemukakan bahwa masalahnya adalah pada tekanan-tekanan ekonomi yang terdapat di Daerah perdesaan sedangkan di Daerah perkotaan sendiri penyediaan kebutuhan, penampungan lapangan usaha maupun kesempatan-kesempatan perbaikannya belum siap. Akibatnya muncul kasus-kasus perkotaan yang cukup riskan, contoh timbulnya daerah-daerah perumahan liar, timbulnya pemusatan pedagang kaki lima, timbulnya kegiatan usaha yang dikatakan non formal, kekurangan fasilitas-fasilitas kota dan lain-lain.

Hasil penelitian beberapa studi kasus perkembangan kota di Indonesia yang dilakukan lembaga penelitian Planologi ITB. Salah satunya menyimpulkan bahwa, kota yang sekarang berada pada status Administrasi yang sama, ternyata belum tentu mempunyai fungsi ekonomi yang sama.¹⁰⁾

Akibatnya pada beberapa kota yang berbatasan wilayahnya, persaingan untuk menjadi titik orientasi ekonomi masyarakat tak dapat dihindari. Bisa terjadi orientasi masyarakat pada kedudukan fungsional Administratif dan fungsional ekonomi terpisah. Disuatu pihak, secara Administratif politis masyarakat menjadi bagian kota yang satu dan dilain pihak secara sosial ekonomis tergantung pada kota lain.

10) Soedjono D. SH. *Segi-Segi Hukum Tentang Tata Bina Kota di Indonesi*. PT.Karya Nusantara, Bandung, 1978, hal 24.

Tarikan ekonomis tak dapat dihindari, karna menyangkut pada pemenuhan kebutuhan hidup, tetapi secara konigtif, masyarakat harus menjadi bagian dari wilayah yang menguasainya. mungkin secara ekonomis masyarakat masih tergantung pada kota lain, tetapi tidak dalam hal rasa "diayoni" kota harus dapat dipakai sebagai semacam lambang kosmis yang cukup kuat untuk mengorganisir wilayahnya. hal itu dapat dicapai dengan adanya suatu pusat yang mempunyai arti Simbolis. 11)

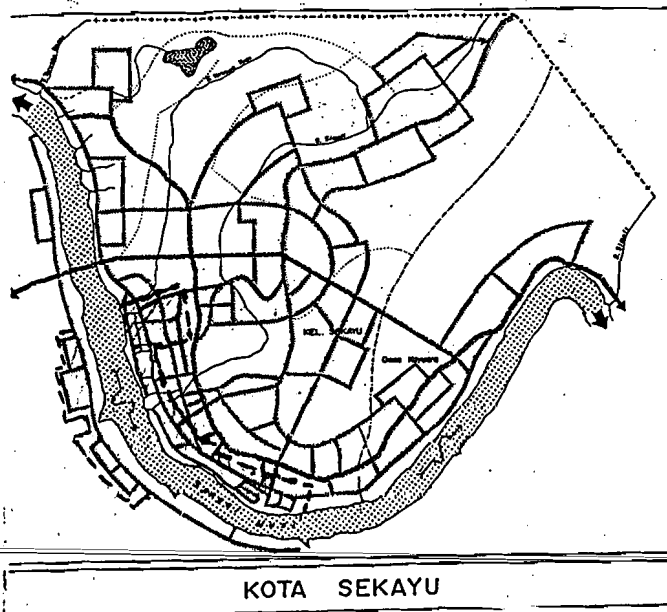
Dimikian halnya dengan wilayah Ibukota Sekayu DT II Musi Banyuasin, yang berbatasan dengan wilayah Kota Propinsi Palembang dan jambi. Perkembangan pesat kota Palembang dan Jambi, yang seolah menelan wilayah sekitarnya, seakan-akan memberi sinyal bahwa sudah saatnya Kabupaten DT II Musi Banyuasin mempunyai kawasan pusat Pemerintahan yang mampu memberikan nilai tambah baik bersifat simbolis maupun Fungsional. Dengan harapan keseluruhan kompleks pemerintahan secara keseluruhan dapat mencerminkan 'Citra' sebagai Ibukota Kabupaten DT II Musi Banyuasin, sekaligus membuktikan bahwa kota Sekayu berkembang bukan hanya akibat samping dari perkembangan Ibukota propinsi Palembang dan jambi.

Kota Sekayu disamping merupakan Ibukota kecamatan Sekayu juga merupakan Ibukota Kabupaten Dati II Musi Banyuasin yang terletak dibagian Utara Ibukota Propinsi daerah Tingkat I Palembang.

11) Amos Rapoport, *Asal Usul Budaya, Pembinaan pemukiman melalui Pengantar kota*, Erlangga Jakarta, 1986, hal 44.

Pada awalnya, kota Sekayu berlokasi di tepi Sungai, artinya orientasi geografis dari kota tersebut oleh adanya pemanfaatan transportasi sungai sebagai prasarana transportasi dengan memanfaatkan sungai Musi sebagai akses utama pada awal pengembangannya.

Begitupula dengan halnya kantor-kantor pemerintahan kabupaten DT II Musi Banyuasin pada waktu itu di rencanakan disepanjang pingiran sungai, mengikuti aliran sungai yang mengalir (Data Sekunder di bawah ini.)



2.1. Peta Lokasi Kantor-Kantor Pemerintahan kabupaten Musi Banyuasin Yang Lama.

Dengan akan dikembangkan jalan darat (Lintas Sumatera) yang menghubungkan kota Sekayu, Ibukota Kabupaten DT II Musi Banyuasin sampai Muara Enim, maka orientasi perkembangan desa-desa yang ada pada jalan tersebut memiliki kemungkinan berkembang yang lebih besar.

Kota Sekayu sendiri sudah dapat dihubungkan dengan jalan darat dengan kualitas yang cukup baik. Kota Sekayu mempunyai akses bilitas yang cukup tinggi disamping dihubungkan dengan jalan darat juga adanya transfortasi Sungai Musi. Keuntungan lokasi kota Sekayu yang demikian akan dapat mendorong fungsinya dalam menunjang (to promote) dan melayani (to serve) sektor-sektor dan bagian wilayah lain.

Dengan ditunjang oleh faktor aksesibilitas dan faktor fasilitas pelayanan yang dimilikinya serta potensi ekonomi wilayah belakangnya, kota Sekayu akan memiliki tingkat perkembangan yang tinggi. Dengan perkembangan tersebut, tampak gejala kota Sekayu cenderung memanfaatkan lahan yang berakses tinggi saja,, sehingga membentuk pola Linear (untuk perkembangan selanjutnya akan kurang menguntungkan, karena jarak pelayanan akan menjadi lebih besar atau kurang efisien), dan pemanfaatan ruang/lahan yang berimpit dengan badan jalan atau badan sungai.

Atas dasar permasalahan diatas, maka pemerintahan daerah Kabupaten TK II Musi banyuasin mengupayakan menyusun sesuatu arahan pendayagunaan ruang untuk pedoman pengisisan kegiatan dengan segala aspeknya di Kota Sekayu, agar pemanfaatan ruang yang berjangka panjang dan berstruktur dapat terujud dalam kaitannya dengan efisiensi ruang dan pelayanan kota, yang dituangkan dalam rencana umum tata ruang kota (Revisi RIK) Sekayu.

D. Penetapan Fungsi Bagian Berdasarkan Pengembangan Wilayah Kota Sekayu.

Berdasarkan maksud dan tujuan dari pembagian wilayah kota sebagai mana telah dibahas dalam buku analisis mengenai kota Sekayu (sub-bab 4.1.1.1 dan 4.1.2) maka pada prinsipnya bagian wilayah kota merupakan satu kesatuan lingkungan kegiatan kota yang serasi dengan sarana dan prasarana yang merupakan faktor pendukungnya.

Sehubungan dengan adanya konsentrasi kegiatan yang menunjukkan pranan dari tiap bagian wilayah kota dewasa ini, maka arahan fungsi dan peranan dari tiap bagian wilayah tersebut dapat ditetapkan sebagai berikut :

Bagian Wilaya Kota A

Fungsi kegiatan pada bagian wilaya kota A ini, diarahkan untuk pengembangan kegiatan pusat perdagangan dan Terminan lokal, Ruma Sakit, Pusat Kegiatan Pelayanan Jasa Umum lainnya (Jasa dan perkantoran swasta), pusat pelayanan kebudayaan dan rekreasi (bioskop dan gedung olah raga) serta kawasan perumahan dengan tipe kapling kecil - sedang. kawasan ini merupakan pusat kota.

Bagian Wilaya Kota B

Sesuai dengan dominasi kegiatan yang terdapat di bagian wilayah kota B, maka fungsi bagian wilayah kota ini diarahkan sebagai pusat perkantoran pemerintahan (baik tingkat kabupaten, kecamatan maupun kelurahan dan desa), Pusat Pelayanan Pendidikan (umum dan kejuruan) serta sebagai kawasan pertanian dan perumahan kapling kecil-sedang.

Bagian Wilaya Kota C

Fungsi kegiatan pada bagian wilayah kota C ini, diarahkan untuk pengembangan parawisata Danau Ulak Lia, perumahan penduduk dengan kapling besar dan sekaligus sebagai kawasan konservasi.

Bagian Wilaya Kota D

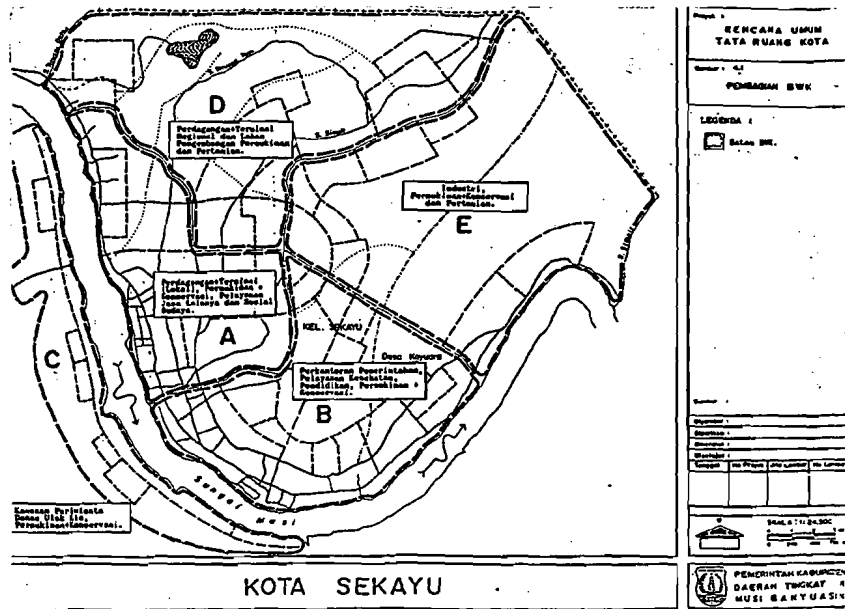
Potensi lahan pada bagian wilayah kota D ini, diarahkan untuk perluasan dan pengembangan fisik Kota Sekayu yang potensial. Untuk mendukung perkembangan tersebut diusulkan lokasi terminal dan perdagangan regional pada bagian wilayah kota ini, sehingga fungsi kegiatan pada bagian wilayah kota ini sebagai pusat perdagangan dan perhubungan (Terminal) regional serta pengembangan kawasan perumahan dan penyediaan lahan pertanian.

Bagian Wilaya Kota E

Fungsi kegiatan pada bagian wilayah kota ini akan diarahkan sebagai pengembangan kawasan industri, terutama industri perkayuan yang akan mendukung industri saw-mill yang ada dewasa ini.

Potensi lahan bagian wilayah kota E ini, diarahkan pula sebagai kawasa perluasan fisik Kota Sekayu, sehingga fungsi bagian wilayah kota ini selain sebagai pusat pengembangan industri perkayuan juga merupakan areal pengembangan pertanian dan lingkungan permukiman.

Untuk lebih jelasnya mengenai pembagian wilayah kota di Kota Sekayu dapat dilihat pada peta rencana pengembangan kawasan Kota Sekayu.



E. Kebijakan Rencana Pengembangan Kependudukan Kabupaten DT II Musi Banyuasin.

Dari latar belakang perkembangan serta beberapa asumsi yang dipakai, pada analisis telah dikemukakan perkiraan jumlah penduduk yang akan diakomodasi di kota Sekayu sampai tahun 2012. Dengan interval 5 tahun dapat dikemukakan perkiraan jumlah penduduk sebagai berikut :

- 1992	=	20.165 jiwa,
- 1997	=	22.074 jiwa,
- 2002	=	24.164 jiwa,
- 2007	=	26.453 jiwa,
- 2012	=	28.957 jiwa.

Seperti dikemukakan di depan, dominasi kegiatan penduduk masih pada sektor pertanian, walaupun laju pertumbuhan pada kegiatan lain (terutama perdagangan, Jasa dan Pemerintahan) cukup tinggi. Pada akhir periode perencanaan diperkirakan minimal setengah dari jumlah kepala keluarga yang ada akan terlibat dalam sektor-sektor non-pertanian, seperti perdagangan, jasa, pemerintahan dan industri.

Dewasa ini kepadatan penduduk menurut kawasan fungsional Kota adalah sekitar 10 jiwa/ha, luas kawasan fungsional yang telah ditetapkan sebagai wilayah kota Sekayu adalah 2.898,325 ha.

Untuk perencanaan kota-kota baru, dari standard Departemen pekerjaan umum, Direktorat Jendral Cipta Karya, kepadatan penduduk rata-rata adalah 83 jiwa/ha. sedangkan kebijaksanaan kependudukan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (MENDAGRI) nomor 7/1986, bahwa kebijaksanaan kepadatan penduduk untuk kota Kecamatan di luar pulau Jawa dan Bali maksimum 60 jiwa/ha. Bertitik tolak dari hal tersebut, maka kepadatan di Kota Sekayu akan dibagi menjadi tiga, yaitu kepadatan tinggi hingga 60 jiwa/ha, kepadatan sedang antara 40 hingga 50 jiwa/ha, dan kepadatan rendah hingga 40 jiwa/ha.

F. Pusat Pemerintahan Yang menunjang Citra kota.

Seperti disebutkan sebelumnya, kota harus dapat dipandang sebagai semacam lambang kosmis, yang cukup kuat untuk mengorganisir wilayahnya. Hal itu bisa dicapai dengan adanya suatu pusat yang mempunyai arti simbolis.

Simbolisme kota sebagai suatu pemikiran yang diwujudkan dalam bentuk fisik, yang cukup kuat mengorganisir wilayahnya, sebenarnya merupakan perwujudan dari pola-pola yang kognitif. 12)

Ada dua hal yang mempengaruhi pola kognitif seseorang yaitu : 13)

- Pendekatan stimulus-respon dari tingkah laku psikologis (Hull, 1943). Disini pengalaman terhadap suatu kota berperan penting, yang menyebabkan seseorang mempunyai 'ingatan' terhadap kota tersebut.
- Yang kedua dengan cara memberikan Image dari tata ruangnya. Dalam hal ini 'Kestabilan posisi' komponen-komponen fungsional kota sangat penting, yang dipengaruhi oleh faktor jarak dan arah. Faktor kedua ini selanjutnya akan menjadikan batasan dalam pencapaian tujuan perancangan nanti.

Image sebuah kota menurut Kevin Lynch (1960) dapat diperoleh dari tiga faktor, yaitu :

1. Identitas (Identity), berarti sebuah obyek (kota) memiliki ciri, kepribadian (Individuality). Identitas dapat digali dari unsur-unsur yang membuat kota tersebut menonjol.
2. Struktur (Structure), adalah hubungan ruang antara unsur-unsur dalam kota.

12) Amos Rapoport, *Asal Usul Budaya Pemukiman Melalui Pengantar perencanaan Kota*, Erlangga, Jakarta 1986, hal 43.

13) J. Douglas Porteous, *Environment & Behavior*, Addison Westy Publishing Company, Hal 99.

3. 'Arti' (Meaning), adalah makna dari unsur-unsur dalam kota sehubungan dengan pengamat makna ini dapat di kenal secara Spasial maupun Struktural.

Identitas, 'Structure' dan 'Meaning' di atas, masing-masing saling berkaitan membentuk image kota.

Selanjutnya, menurut Lynch, ada interaksi antara bentuk fisik dalam kota dan persepsi orang terhadap bentuk itu. Ia mengidentifikasikan elemen-elemen pokok yang membentuk stucture kota, seperti jalan-jalan kecil (pathways), 'tebing-tebing' (edges), 'titik-titik pusat' (nodes), 'kawasan-kawasan dalam kota' (district) dan landmark. 14) Elemen-elemen yang membentuk citra kota tersebut apabila mempunyai pengaruh yang cukup kuat dan digali dari potensi-potensi yang ada dapat menunjang pembentukan identitas kota.

Pusat pemerintah, sebagai salah satu komponen fungsional dalam kota, saling tergantung dengan komponen fungsional kota yang lain, yaitu perdagangan, kebudayaan, hiburan dan komponen fungsional sejarah / pelestarian. Dalam hal konstelasi tata ruang secara keseluruhan, antara berbagai komponen fungsional di atas secara organik saling menempati dirinya pada satu tempat kedudukan tertentu, dengan satu komponen fungsional tertentu sebagai pengikat.

14) Robert M, Beckley, Urban Design Melalui Pengantar Perencanaan Kota, Erlangga, Jakarta 1986, hal 93.

Pada konsep tata ruang lama (tradisional), kekuasaan keraton merupakan awal dan centrum pertumbuhan dan perkembangan kota. Konsep konstelasi tata ruang kota sangat jelas, dengan keraton dan alun-alun sebagai titik pusat, serta satu poros jalan utama sebagai pengikat komponen fungsional yang lain. Perkembangan selanjutnya, dengan semakin komlek dan beragamnya komponen fungsional dalam satu kota serta berubahnya sistem nilai dalam masyarakat, konsep tradisional seperti di atas tidak dapat begitu saja diterapkan lagi.

Tetapi untuk memantapkan satu perkembangan kota dan memberikan kemudahan pelayanan serta kepercayaan politis masyarakat wilayahnya. Tetap diperlukan pemantapan tata komponen fungsional pemerintahan dalam satu kota. Salah satu jalan adalah dengan mengelompokkan unit-unit pemerintahan menjadi satu aransemen tata komponen bangunan-bangunan pemerintahan dalam kota.

Pusat pemerintahan yang mantap, satabil dan dapat memberikan Image positif dari susunan tata ruangnya akan dapat menunjang citra kota, melalui elemen-elemen tatanan fisik yang telah disebutkan, simbolisme sebagai pusat dapat dicapai.

Dalam jajaran pemerintah daerah, kedudukan bupati / kepala daerah tingkat II sebagai pemegang fungsi eksekutif setara dengan DPRD sebagai pemegang fungsi legeslatif. Tetapi secara simbolis, bupati adalah pemegang kekuasaan tertinggi di wilayah kabupaten Dati II, karena ia merupakan ujung tombak dalam menjalankan pemerintahan di daerah.



Dengan anggapan bahwa kantor bupati adalah pasilitas fisik pemerintahan Dati II yang paling tinggi dalam arti simbolis maupun fungsional, maka perencanaan dan perancangan Kantor Bupati dalam kompleks pemerintahan Dati II Musi Banyuasin haris dapat memberikan citra sebagai pusat pemerintahan yang sebenarnya.

Keberadaan kantor bupati dalam komplek pusat pemerintahan Dati II Musi Banyuasin tersebut harus memancarkan nilai-nilai yang diharapkan dapat mewujudkan satu prinsip pengakuan umum dari masyarakat, antara lain :

- Stabilitas, yaitu kemantapan dan keamanan pusat pemerintahan terhadap unsur-unsur atau 'tarikan' dari luar (pusat kota lain).
- Accesibilitas, yaitu kemudahan pencapaian dari segala penjuru wilayah kota.
- Orientasi, yaitu sebagai titik orientasi, yang menjadi pedoman, penggerak dan pengarah proses pembangunan disekitarnya.
- Integritas, yaitu kesatuan dari berbagai faktor, baik dalam kaitannya sebagai satu sistem pemerintahan yang harus bersifat koordinatif dan formal, maupun dalam kaitannya dengan sistem kemasyarakatan dan pembangunan yang harmonis, mounumental dan simbolis.

Melalui pendekatan dari faktor kondisi fisikdan lingkungan yang ada, nilai-nilai diatas digunakan sebagai batasan dalam menterjemahkan citra pusat pemerintahan Dati II Musi Banyuasin secara Arsitektural.

G. Pengembangan Kantor Kabupaten Dati II Musi Banyuasin

Lokasi lingkungan pusat pemerintahan yang direncanakan, sesuai dan konsisten dengan rencana Pemda Tingkat II Musi Banyuasin yang tertuang dalam rencana bagian wilayah kota (RBWK) kecamatan Sekayu sampai dengan tahun 2012. Dalam RBWK tersebut ditetapkan bahwa kantor kabupaten / pemerintahan akan dilokasikan di unit Destrik perencanaan tata ruang dibagian wilayah kota B (lihat Peta).

1. Data Fisik Lahan Perkantoran Kabupaten (Pusat Pemerintahan)

- Topografi

Wilayah kecamatan Sekayu di kelurahan Sekayu tepatnya berada pada lahan yang relatif datar antara 0 - 5%. Pengembangan daerah tersebut terutama dilakukan dengan meminimalkan usaha tambah, seperti halnya urug dan gali (cut and fill) serta didalam pengembangan ini seyogyanya diikuti dengan penataan sistem drainase.

Menurut rencana tata ruang kota (RTRK), kantor kabupaten akan diletakan pada lahan yang berbukit dengan kemiringan 4%. Penempatan bangunan-bangunan fasilitas pusat pemerintahan pada bagian bukit, secara visual akan lebih tinggi dari kawasan pengembangan disekitar BWK B. Guna dipakai sebagai fungsi-fungsi yang lain pada peta terlampir, dapat dilihat kondisi topografi kawasan pusat pemerintahan dibandingkan dengan kondisi disekitarnya, hal ini dikarenakan lokasi cukup strategis jika dinilai dari aksesibilitas pergerakan penduduk ke lokasi tersebut,

terutama didukung dengan jumlah penduduk pendukung yang relatif mempunyai kepadatan tinggi (+ 200 jiwa/ha) terutama di sekitar blok kawasan perencanaan.

- Geologi

Lahan pusat pemerintahan berada pada lokasi yang jenis tanahnya slang-seling antara batas pasir tufa dan lempung, dibanding daerah disekitarnya kondisi ini relatif lebih baik. Pada lahan yang direncanakan untuk pusat pemerintahan, daya dukung tanahnya 1,50 kg/cm² pada kedalaman 5-10 M. sedang disebelah baratnya, sebagai perbandingan, daya dukung yang sama baru pada kedalaman 15 M atau lebih, daya dukung dan satuan marpologis dapat dilihat pada lampiran.

2. Batasan-Batasan Perencanaan

- Luas lahan

Lahan untuk kantor kabupaten / pusat pemerintahan Kabupaten Dati II Musi banyuasin, secara garis besar berbentuk segienam / lingkaran, terletak pada lahan yang berbukit dengan permukaan tertinggi (lihat peta). Luas lahan yang direncanakan bagi pusat pemerintahan secara keseluruhan + 45 ha, termasuk jalur lalulintasnya.

- Floor Area Ratio (FAR)

Karena belum adanya rujukan yang pasti untuk floor area ratio pada lahan pusat pemerintahan, maka diambil angka FAR sebesar 1,5 s/d 3. Angka tersebut diambil berdasarkan studi literatur, stadi banding dan analisa perkiraan suatu lingkungan pusat pemerintahan yang sama

dengan kecenderungan yang nantinya akan terjadi dikawasan pusat pemerintahan tersebut.

- Building Coverage (BC)

Bulding Coverage bagi lahan pusat pemerintahan ini telah ditetapkan sebesar 30%.

- Garis Sempadan Bangunan

Telah ditetapkan dalam RTRK, bagi lingkungan pusat pemerintahan dan perumahan di kota 'baru' Sekayu, untuk wilayah jalan protokol selebar 40 M garis sempadan berkisar antara 15 - 20 M.

- Ketinggian Bangunan

Menurut ketentuan yang telah ditetapkan, ketinggian bangunan maksimum yang diijinkan bagi sebuah kota 'baru' adalah 4 lantai yang diperhitungkan dari permukaan tanah. Tetapi untuk bangunan di daerah perkantoran ini dibatasi maksimum tiga lantai dari permukaan tanah.

Ratio Luas Ruang

Ratio pemakaian luas lantai menggunakan pedoman yang telah ditetapkan (oleh Bappenas), yaitu :

* Ruang Pimpinan	: 30 - 46 m ² /orang
* Ruang Pembantu Pimpinan	: 10 - 16 m ² /orang
* Ruang staf / karyawan	: 6 - 10 m ² /orang
* Ruang Rapat	: + 2,5 m ² /orang
* Ruang Fasilitas Umum	: 0,6 - 2,5 m ² /orang

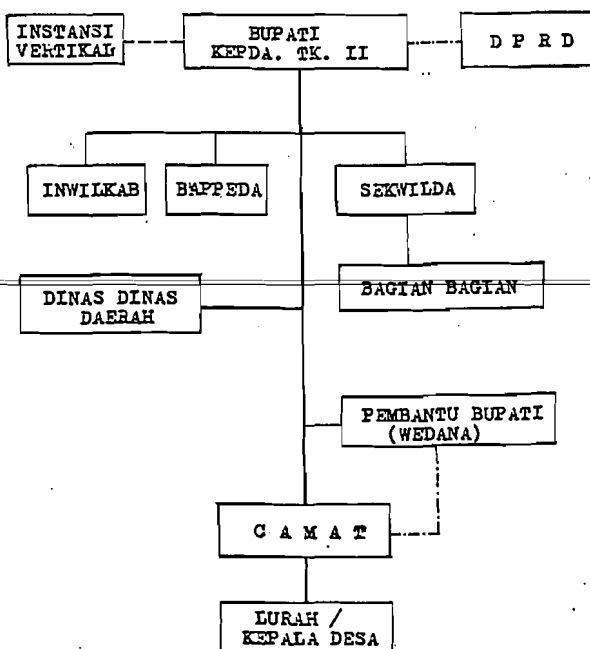
Perbandingan Luas Ruang adalah :

- * Fungsi Kegiatan Kantor (Office Space) : 60 - 70 %
- * Fungsi Sirkulasi (Circulation Space) : 15 - 20 %
- * Fungsi Umum dan Pelayanan : 15 - 20 %

- Struktire Organisasi Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin

Struktire Organisasi Pemerintahan, daftar instansi yang terlibat dan perkiraan jumlah pegawai pemerintahan Dati II Musi Banyuasin, dapat dilihatkan berikut ini, dan juga dapat diperjelas lagi pada bab lampiran berikutnya :

**STRUKTURE ORGANISASI
PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II MUSI BANYUASIN**



Keterangan :

- garis perintah
- - - - - garis koordinatif
- ==== garis staf
- - - - - garis konsultatif

**DAFTAR INSTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI BANYUASIN**

No.	Unit Kerja/Instansi	No.	Unit Kerja/Instansi
1	Kantor Bupati	8	Instansi Vertikal :
2	Sekwilda		Mawil Hansip
3	Itwilkab		Agraria
4	SP 7		Bangdes
5	Bappeda		Sospol
6	OPRO		Kodim
7	Dinas-Dinas Otonom :		Kores
	D. Pendapatan		Kejaksaan Negeri
	D. PU		Pengadilan Negeri
	D. Pertanian		Kandep Dikbud
	D. Perikanan		Kandep Perdagangan
	D. Peternakan		Kandep Naker
	D. Pariwisata		Kandep Penerangan
	D. Perkebunan		Kantor Cat. Sipil
	D. Dikbud		Pegadaian Negeri
	D. Perindustrian		Kantor Pos dan Giro
	D. Kesehatan		Kantor PU Sia. Pengairan
	D. Pemukiman		Kantor PU Cipta Karya
	D. Kebakaran		Kantor Statistik
	D. Kebersihan		PLN
	D. Tata Kota		Perum Telkom
	D. Perburuhan		PDAM
	DLLAJR		Perum Perhutani
			PN. Gas Pertamina
			Dinas Sosial Propinsi
			Dispenda Propinsi
			SKKBN
			PWF
			Pimpinan GOW
			PMI
			PJRA
			BPD
			BRI
			BNI '46
		9	Sarana Penunjang
			Lapangan Upacara
			Gedung Pertemuan
			Monumen Kota

PERKIRAAN JUMLAH PERSONIL

UNIT KERJA	PIMPINAN	KABAG/ KABID/ KASIE		KASUBAG/ STAF KASUBSIE		STAF	TOTAL PERSO NIL
		B	C	D	E		
1. UNIT PEMDA	1	3	-	-	-	-	4
Bag Pemerintahan	1	-	-	-	4	13	18
Bag Pembangunan	1	-	-	-	3	11	15
Bag Kepegawaian	1	-	-	-	3	9	13
Bag Perekonomian	1	-	-	-	3	18	22
Bag keuangan	1	-	-	-	5	21	27
Bag Humas	1	-	-	-	2	7	10
Bag Hukum	1	-	-	-	4	7	12
Bag Uama	1	-	-	-	4	64	69
Bag Kesra	1	-	-	-	4	17	22
2. ITWILKAB	1	2	6	6	17	51	83
3. B P 7	1	2	2	2	8	24	39
4. BAPPEDA	1	2	5	5	5	15	33
5. DPRD TK II							
D P R D	1	2	3	9	-	13	28
DPD Golkar							
DPC PDI							
DPC PPP							
6. DINAS OTONOM							
Dispenda	1	2	-	-	23	50	73
D. PU	1	2	-	-	12	60	95
D. Pertanian	1	2	5	5	5	15	33
D. Perikanan	1	2	5	5	5	15	33
D. Peternakan	1	2	5	5	5	15	33
D. Pariwisata	1	2	5	5	5	15	33
D. Perkebunan	1	2	5	5	5	15	33
D. P & K	1	2	5	5	5	15	33
D. Perindustrian	1	2	5	5	5	15	33
D. Kesehatan	1	2	5	5	5	15	33
D. Pemukiman	1	2	5	5	5	15	33
D. Kebakaran	1	2	5	5	5	15	33
D. Kebersihan	1	2	5	5	5	15	33
D. Tata Kota	1	2	5	5	5	15	33
D. Perburuhan	1	2	5	5	5	15	33
DLLAJR	1	2	5	5	5	15	33

A.	B	C	D	E	F	G	H
7. INST. VERTIKAL							
Mawil' Hansip	1	3	-	-	3	10	16
Agraria	1	2	4	-	11	33	51
Bangdes	1	2	1	-	15	45	62
Sospol	1	2	4	-	13	39	59
Kodia	1	2	5	5	5	15	33
Kores	1	2	5	5	5	15	33
Kejaksaan Negeri	1	2	5	5	5	15	33
Pengudilun Negeri	1	2	5	5	5	15	33
Kandep Dikbud	1	2	5	5	5	15	33
Kandep Koperasi	1	2	5	5	5	15	33
Kandep Perdagangan	1	2	5	5	5	15	33
Kandep Naker	1	2	5	5	5	15	33
Kant. Cat. Sipil	1	2	5	5	5	15	33
Kant. Pegadaian	1	2	5	5	5	15	33
Kant. Pos & Giro	1	2	5	5	5	15	33
Kant. PU Seksi Pengairan	1	2	5	5	5	15	33
Kant. PU Cipta Karya	1	2	5	5	5	15	33
Kandep Penerangan	1	2	5	5	5	15	33
Kantor Statistik	1	2	5	5	5	15	33
P L N	1	2	5	5	5	15	33
Perum Telkom	1	2	5	5	5	15	33
P D A M	1	2	5	5	5	15	33
B K K B N	1	2	5	5	5	15	33
P W I	1	2	5	5	5	15	33
Pimpinan GOW	1	2	5	5	5	15	33
P H I	1	2	5	5	5	15	33
PN Gas Pertamina	1	2	5	5	5	15	33
P J K A	1	2	5	5	5	15	33
D P D	1	2	5	5	5	15	33
B R I	1	2	5	5	5	15	33
B N I 46	1	2	5	5	5	15	33
Perum Perhutani	1	2	5	5	5	15	33
Dinas Sosial Prop	1	2	5	5	5	15	33
Dispenda Prop	1	2	5	5	5	15	33



BAB III

A N A L I S I S

A. Analisis Lokasi Pusat Pemerintahan Kabupaten Dati II Musi Banyuasin.

Wilayah pengembangan kawasan pusat pemerintahan (kantor kabupaten) yang diharapkan menjadi pendorong utama (generator) bagi pertumbuhan kota dan menjadi titik orientasi (secara kognitif) warganya, dalam perencanaan harus mempertimbangkan faktor eksternal dan internal.

Pertimbangan faktor eksternal dilakukan agar dalam pengembangan kawasan tersebut tidak terdapat pengaruh buruk kepada wilayah sekitarnya, terutama dalam memberi identitas politis kabupaten Dati II Musi Banyuasin. Secara eksternal, lokasi pusat pemerintahan harus dipilih pada posisi yang strategis, yang dalam pengembangannya tidak lepas dari keterkaitan antara wilayah, terutama wilayah :

- Kawasan pusat pemerintahan yang direncanakan.
- Kecamatan Sekayu sebagai 'hinterland'-nya.
- Kecamatan-kecamatan lain yang menjadi penarik pertumbuhan.
- Kota Palembang dan Kota Administratif Sekayu (saat ini) yang mendorong tumbuh dan berkembangnya pusat pemerintahan dikawasan baru ini.

Secara internal, lokasi kantor kabupaten dipilih dengan pertimbangan potensi-potensinya yang menonjol sebagai pusat pemerintahan kabupaten Dati II Musi Banyuasin, terutama dari segi fisik dan lingkungan yang dapat menunjang citra kota. Untuk itu, strategi perencanaan internal harus tetap mempertimbangkan keseimbangan pertumbuhan wilayah sekitarnya.

- Kedudukan Kawasan Kantor Kabupaten Pemerintahan Dati II Musi Banyuasin Terhadap Kota Palembang

Pada dasarnya pengembangan pusat pemerintahan Dati II Musi Banyuasin berkaitan erat dengan ibukota propinsi Sumatera Selatan (Palembang). Pengembangan fungsi kantor kabupaten tersebut diharapkan mempunyai peranan terhadap wilayah kota Sekayu - DT II Musi Banyuasin secara keseluruhan, diantaranya adalah :

- * Menjadi Countor Magnet (penarik) terhadap pengaruh perkembangan kota Palembang dan Jambi. Sehingga aktifitas yang berorientasi ke Palembang atau ke Jambi dapat ditarik ke Kota Sekayu, misalnya daerah permukiman. sifat menjadi penarik ini, secara kognitif, akan menjadikan warga wilayah kabupaten Dati II Musi Banyuasin berorientasi ke Kota Sekayu Sebagai ibukota wilayahnya.
- * Menjadi Penghalang (buffer zone) bagi pendatang yang berurbanisasi ke Palembang dari wilayah Selatan. Mereka diharapkan dapat tertahan di kota 'baru' ibukota kabupaten Sekayu - DT II Musi Banyuasin.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa kecuali harus mempunyai nilai aksesibilitas yang tinggi terhadap wilayah yang dikuasainya, pusat pemerintahan kabupaten Dati II Musi Banyuasin juga harus 'mapan' dan 'stabil' kedudukannya. lokasi pusat pemerintahan harus dapat dijangkau secara merata dari keseluruhan wilayah kabupaten Dati II Musi Banyuasin.

- Kedudukan Kawasan Kantor Kabupaten Dati II Musi Banyuasin terhadap Kecamatan Sekayu Dan Kecamatan - Kecamatan Lain.

Wilayah kecamatan sekayu merupakan wilayah hinterland (daerah belakang) dari kawasan pusat pemerintahan. Keterkaitan pusat pemerintahan di pusat kota 'baru' pada dasarnya berbentuk keterkaitan konsumsi dan produksi pertanian. Maka diperlukan kemudahan pencapaian yang akan menunjang eksistensi pusat pemerintahan.

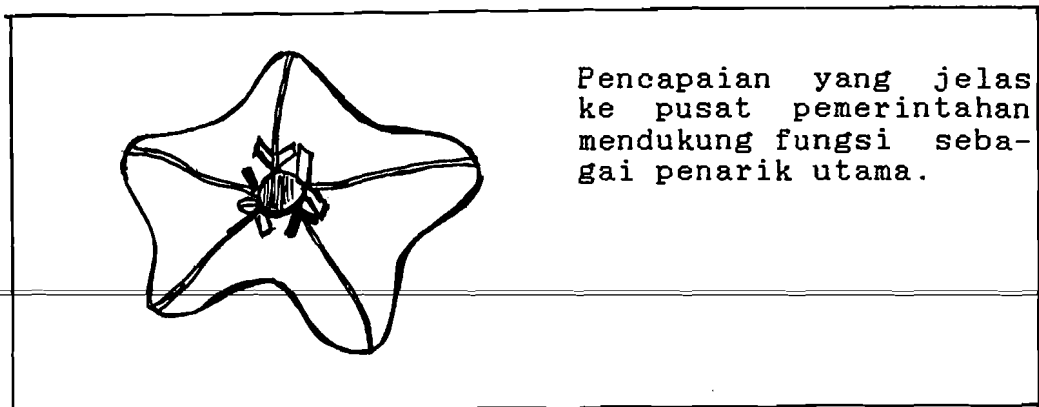
Sebagai pusat pemerintahan kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin, keterkaitan yang paling jelas dengan kecamatan-kecamatan lain di wilayah kota Sekayu adalah dalam hubungan pelayanan pemerintahan. Maka, kecuali perlunya akses yang baik antara pusat pemerintahan dengan pusat pemerintahan tiap kecamatan, pusat pemerintahan harus dapat mengkoordinasikan keseluruhan pemerintahan di kecamatan. Disini kestabilan posisi lokasi pusat pemerintahan terhadap wilayah kecamatan-kecamatan lain menjadi penting. Dan faktor jarak serta arah pusat pemerintahan dapat menjadi penentu.

- **Kedudukan Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten DT II**

Musi Banyuasin Terhadap Kawasan Lain Disekitarnya

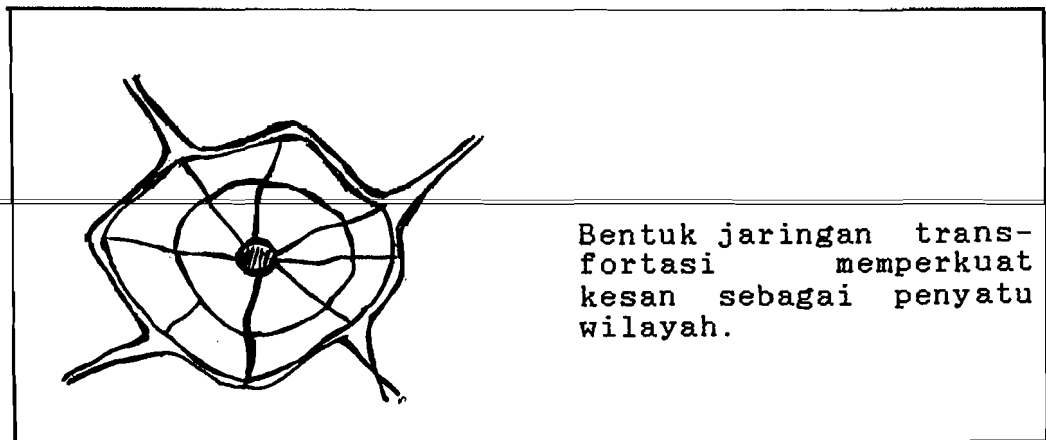
Pada perencanaan pusat pemerintahan di Kota Sekayu kecuali kawasan dikembangkan sebagai lokasi pusat pemerintahan, juga akan dikembangkan sebagai pusat kota. Zone pusat kota tersebut diharapkan dapat menjadi pusat pemerintahan, pusat pemukiman, pusat perdagangan, dan pusat rekreasi. melihat fungsi-fungsi diwilayah pusat kota tersebut maka lokasi pusat pemerintahan akan mempunyai pengaruh antara lain :

- Menjadi 'Zone' penarik utama yang kuat (trip generation) atau zone bangkitan, dengan demikian dia harus mempunyai akses yang kuat ke wilayah sekitarnya

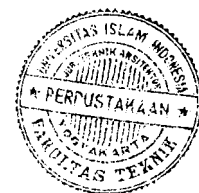


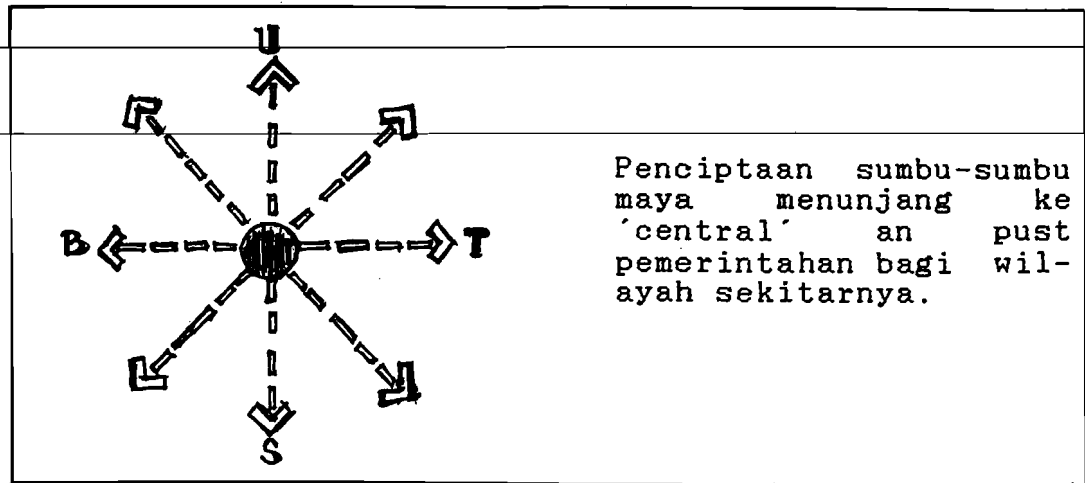
Implikasi yang lebih jauh, lokasi pusat pemerintahan dikawasan pusat kota yang direncanakan harus mempunyai sistem transfortasi yang baik, yaitu yang memiliki sarana dan prasarana serta managemen transfort yang memadai. Untuk itu perlu dilihat keterkaitan yang terjadi antara kawasan pusat pemerintahan (kantor kabupaten) terhadap wilayah pusat kota. Jika

melihat fungsi sebagai pusat kota, maka yang terutama akan terjadi adalah pergerakan pekerja, berbelanja dan rekreasi. Dengan demikian lokasi kantor kabupaten maupun lokasi pusat perdagangan dan rekreasi harus mudah dicapai oleh penduduk wilayah lain. Untuk mendukung fungsi sebagai pusat pemerintahan, perencanaan sistem transportasi dapat menggunakan konsep fasilitas sebagai penyatu, yaitu dengan menganggap penduduk di sekitar pusat kota 'baru' kota Sekayu sebagai pusat komunikasi dan pusat pemerintahan adalah fasilitas komunitasnya. Maka fasilitas pusat pemerintahan ini perlu dapat mudah dicapai dari semua arah kota. Lokasi seperti di atas akan memperkuat kesan psikologi pusat pemerintahan sebagai penyatu wilayahnya



- Kawasan pusan pemerintahan merupakan pusat orientasi atau pedoman dalam mengatur dan mengarahkan pembangunan disekitarnya. Maka lokasi pusat pemerintahan harus 'centris', dalam arti dapat dijadikan 'pusat' bagi wilayah-wilayah sekitarnya.





B. Analisis Citra Pusat Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin.

Pada dasarnya, citra masyarakat pada bangunan dan kotanya adalah untuk melaksanakan tiga fungsi, yaitu : 1)

1. Mereka menyederhanakan dunia ke dalam simpul-simpul ingatan yang dapat ditangkap alam pikirannya.
2. Mereka memberi arti kepada dunia dengan membuat personifikasi bangunan-bangunan untuk menjadi miliknya.
3. Mereka memberi kerangka bagi komunikasi kelompok berdasarkan pengalaman bersama dan perasaan tentang lingkungan.

Dalam bab terdahulu telah disebutkan, bahwa satu komponen citra kota, menurut Kevin Lynch, adalah identitas, yaitu ciri dari unsur-unsur yang membuat suatu kota menonjol.

1)Gery T. Moore, *Pengkajian Lingkungan-Prilaku Melalui Pengantar Arsitektur*, Erlangga, Jakarta, hal 97.

Dengan menggunakan dasar teori dari Lynch dan batasan yang ingin dicapai di atas, perencanaan dan perancangan kantor bupati dalam kawasan pusat pemerintahan Dati II Musi Banyuasin dilakukan melalui penggalian potensi kondisi fisik dan lingkungan, terutama dengan pertimbangan-pertimbangan tapak bangunan.

1. Pendayagunaan Unsur Topografi Dan Pemandangan

Kondisi lahan pusat pemerintahan kabupaten Dati II Musi Banyuasin yang berada pada tempat tertinggi dibanding lingkungan sekitarnya, memberi peluang untuk memanfaatkan pemandangan dalam menata ruang pusat pemerintahan.

melalui analisa dari peta Topografi, dapat dilihat bahwa unsur pemandangan dapat dimanfaatkan sepenuhnya untuk memperkuat penampilan (visual) pusat pemerintahan. Pemanfaatan pertama yaitu dengan menciptakan sumbu maya pada kawasan. Karenan letak lahan yang relatif tinggi dibanding lahan sekitarnya, maka pemandangan pada kawasan konserpasi (~~di sebelah selatan~~) tepatnya disepanjang pinggiran sungai Musi dan jalur lintas utara sampai ke arah Muara Enim menjadi suatu potensi yang menunjang pemandangan. Pemandangan dari kondisi yang ada dapat digunakan untuk pembentuk sumbu-sumbu maya, yang sangat diperlukan dalam penataan tata ruang pusat pemerintahan. Sumbuh maya tersebut selanjutnya akan digunakan sebagai pedoman dalam pembentukan ruang pusat pemerintahan (kantor kabupaten).

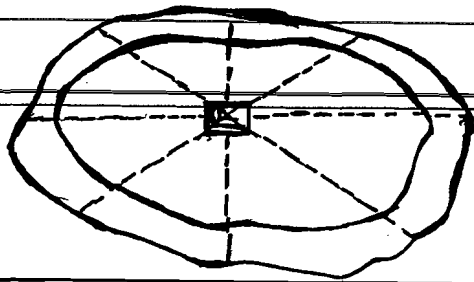
Kondisi Topografi yang mempunyai kemiringan 4 % pada lahan pusat pemerintahan, dimanfaatkan juga untuk peletakan bangunan-bangunan kantor pemerintahan. Pemanfaatan kontur alam secara alami dipilih untuk digunakan sebagai pengaturan kedudukan / letak sesuai dengan hubungan tata kerja instansi pemerintahan daerah tingkat dua kabupaten Musi Banyuasin.

Dengan begitu, kantor bupati yang dianggap sebagai fasilitas fisik pemerintahan Dati II paling tinggi, secara Topografi dapat diletakan pada dua alternatif ketinggian, yaitu pada permukaan lahan terendah dalam komplek pusat pemerintahan atau pada titik tertinggi lahan.



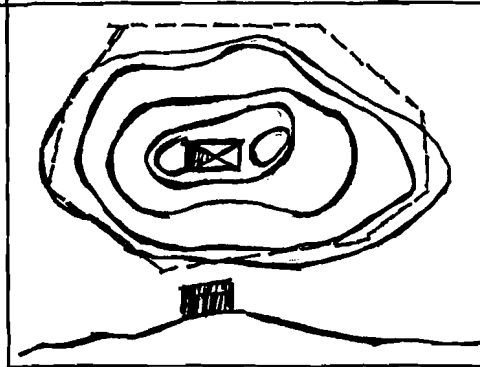
Karena dengan kedudukan pada lahan dengan ketinggian ekstrem tersebut, diharapkan dapat mendukung kejelasan penampilan kantor bupati, secara fungsional maupun simbolis.

Tetapi secara horizontal, peletakan kantor bupati akan mendukung kesan monumental apabila ia berada ditengah-tengah lahan pusat pemerintahan. Dengan keberadaannya yang ditengah lahan pusat pemerintahan, akan sesuai dengan fungsinya sebagai pusat orientasi.



Secara horisontal, peletakan bangunan di tengah-tengah lahan, akan mendukung fungsi sebagai pusat orientasi

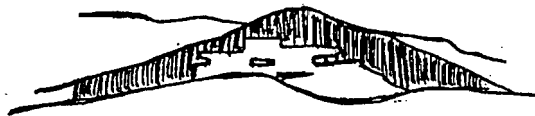
Mengingat permukaan lahan pusat pemerintahan berupa bukit landai (kemiringan 4%) dengan titik tertinggi lahan pada kedudukan horisontal yang relatif di tengah-tengah (lihat peta), maka dipilih alternatif peletakan bangunan kantor bupati pada permukaan tertinggi lahan pusat pemerintahan.



Karena permukaan tertinggi lahan pada kedudukan horisontal relatif di tengah-tengah, maka dipilih alternatif, bangunan kantor bupati pada permukaan tertinggi lahan

Penyelesaian tapak dengan suatu latar belakang pemandangan yang cukup menonjol, seperti pada lahan

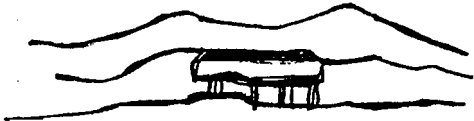
Letak bangunan pada permukaan tertinggi lahan yang berbukit, memberikan kesempatan untuk memanfaatkan pemandangan kawasan pariwisata danau Ulak Lia dan kawasan konservasi di sepanjang sungai Musi yang melintasi daerah tersebut.



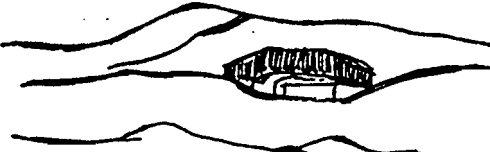
* Bangunan dikontraskan dengan latar belakang dan diberi pengolahan lahan di antara pepohonan dll.



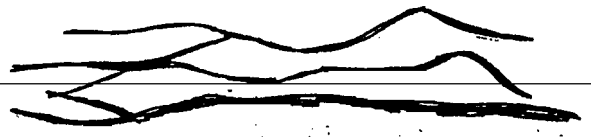
* Bangunan menonjol mendominasi latar dan merupakan suatu perluasan fisik dataran / lahan



* Bangunan menonjol atau tenggelam pada lahan, tetapi masih berhubungan langsung dengan latar belakang (potensi lahan)



* Bangunan dinaikkan dan terasing dari kawasan lahan.



Modifikasi kontur tampak



Menjadikan kontur dengan menghilangkan puncak-puncak kontur, atau flora



Bangunan memanfaatkan kontur sepenuhnya

pusat pemerintahan kabupaten daerah Tingkat II Musi Banyuasin ini, secara arsitektural mempunyai dua alternatif pemecahan, yaitu : 2)

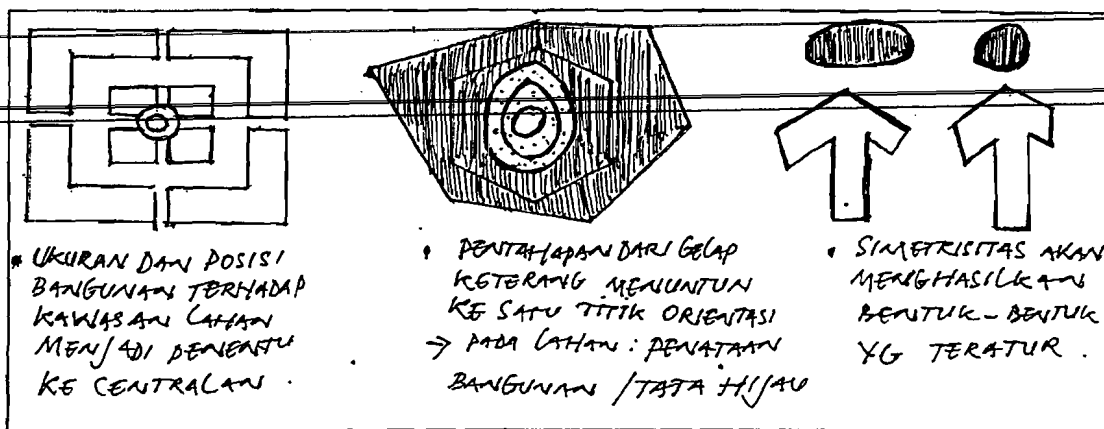
- Penampilan bangunan mendominasi keistimewaan-keistimewaan yang terdapat pada pemandangan sekitar kawasan lahan.
- Penampilan bangunan didominasi keistimewaan lahan sekitar.

2. Kejelasan Orientasi dan Monumentalitas

Kejelasan orientasi merupakan bagian dari kesan visual yang diperlukan untuk menunjang citra pusat pemerintahan. Dalam kasus pusat pemerintahan Kabupaten Dati II Musi Banyuasin membentuk sumbu-sumbu maya dan kejelasan orientasi merupakan satu batasan yang menentukan perencanaan dan perancangan selanjutnya. Kejelasan orientasi dan sumbu maya merupakan dua unsur yang saling membentuk. Keduanya berkaitan dengan simetrisitas ruang dan masa bangunan, yang menunjang mendukung nilai formal pusat pemerintahan.

Simetri adalah suatu aspek keseimbangan dalam komposisi. Keseimbangan merupakan suatu keadaan seimbang secara visual, yang berasal dari wujud, ukuran, warna dan bobot yang terlihat dari elemen-elemen dibidang penglihatan. Dari segi keseimbangan, suatu komposisi biasanya digambarkan simetri, yaitu elemen-elemen yang terdapat, sama dan terbagi rata dalam satu jurusan atau lebih pada satu titik pusat.

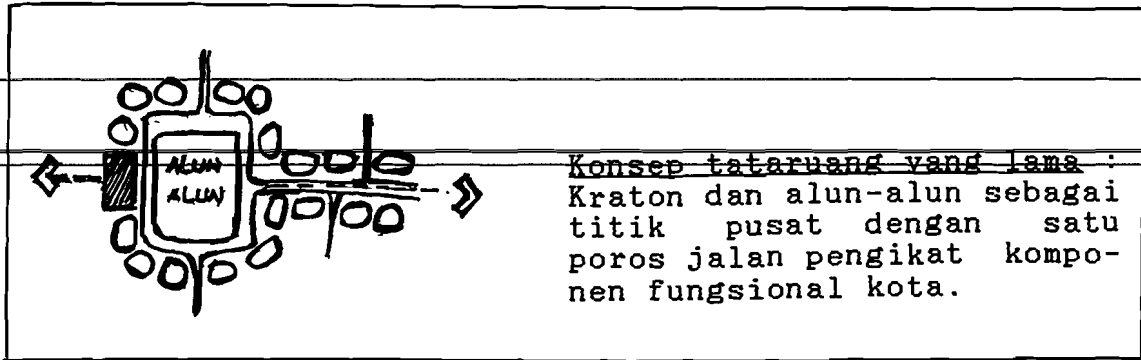
2) Isaac-Arg, Pendekatan Kepada Perancangan Arsitektur, Intermatra, Bandung, 1986, hal 64-65.



Pada pusat pemerintahan ini, titik orientasi merupakan titik pertemuan sumbu-sumbu maya yang dibuat. Titik orientasi juga dibentuk dari 'Zona tegangan' berbagai elemen terhadap satu sama lain secara visual. Termasuk disini adalah jaringan transportasi dikawasan pusat pemerintahan. Orientasi yang menciptakan simetrisitas akan memberikan kesan resmi, teratur sesuai dengan nilai formal yang harus dipancarkan pusat pemerintahan sebagai suatu lembaga negara.

Adanya komponen fungsional kota, yaitu pusat pemerintahan yang baru, mendorong munculnya fasilitas pusat kota yang lain di sekitarnya, misalnya Masjid, Gedung Olahraga, Kesenian dan lain-lain. Kejelasan orientasi dari fasilitas-fasilitas tersebut ke pusat pemerintahan akan mendukung nilai pusat pemerintahan sebagai pemersatu yang menjadi titik orientasi.

Pada tata ruang yang lama, sangat jelas bahwa keraton dan alun-alun dijadikan titik pusat, dengan satu poros jalan utama sebagai pengikat komponen fungsional kota yang lain.



Pada tata orientasi seperti di atas, fungsi dan simbol sebagai pusat pemerintahan sangat jelas. Jaringan jalan dan tata letak fasilitas kota menunjang nilai-nilai yang harus dipunyai pusat pemerintahan / kator kabupaten, simetris, formal dan alun-alun yang mengandung kemonumentalan kraton.

Pada konstelasi tata ruang kota yang baru, karena semakin kompleknya perangkat pemerintahan dan mudarnya nilai-nilai tradisi yang dipunyai masyarakat, tata orientasi seperti di atas tak dapat diterapkan begitu saja. Ada perangkat DPRD yang mempunyai kedudukan setara dengan Bupati, walaupun secara simbolis Bupati tetap dianggap yang tertinggi. Ada fungsi-fungsi koordinasi yang merupakan tangan-tangan kerja bupati dan ada pula fungsi-fungsi dinas, direktorat, non direktorat yang secara bersama menjalankan fungsi pemerintahan daerah. Walaupun begitu, konsep simetri dari pembentukan sumbu-sumbu maya, tetap akan menuntun dalam peletakan fungsi-fungsi perangkat pemerintahan dan fasilitas kota dalam suatu tata orientasi tertentu. Dalam hal ini, tata orientasi yang dipergunakan, kecuali tetap menggunakan konsep simetri, letak bangunan tergantung pada nilai kepentingan bangunan tersebut pada suatu pusat pemerintahan. Dan karena fungsi simbolis

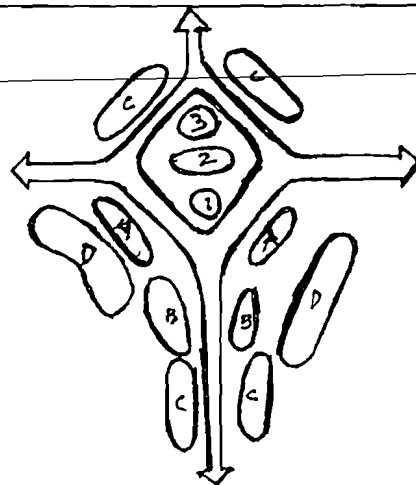
ruang terbuka tetap dapat dijadikan pengikat bangunan di dalam kompleks pemerintahan.

Bangunan dan ruang yang penting diletakan pada garis sumbu maya, dalam hal ini gedung DPRD, ruang terbuka/lapangan upacara dan kantor Bupati. Semuanya merupakan wadah pemegang kekuasaan tertinggi dalam fungsi legislatif dan eksekutif di daerah. Fungsi-fungsi pemerintahan yang lain, serta fasilitas kota yang dianggap kurang penting, diletakan diluar garis sumbu maya, tetapi berorientasi secara simetris kelompok bangunan di atas atau garis sumbu maya itu sendiri. Pemanfaatan pemandangan dan simetrisitas selanjutnya akan mendukung bagi kesan monumental, yang diperlukan bagi bangunan pusat pemerintahan. Ada tiga pendekatan untuk menjadi kesan monumental pada pusat pemerintahan Kabupaten Dati II Musi Banyuasin ini, yaitu pertama pada perancangan bangunan.

ASUMSI TATA ORIENTASI RUANG

1. 2. 3 Ruang/bangunan yang dianggap penting di letakan pada garis-sumbu.

- A. Fasilitas fisik penunjang.
- B. Fasilitas pusat kota.
- C. Permukiman.



Seperti diketahui, persepsi dari suatu wujud didasarkan pada tiga keistimewaan, antara lain profil umum

nya. Demikian pula pada perancangan bangunan kator kabupaten ini. ~~Kesan monumental dapat melalui tiga cara~~ tersebut, yaitu bentuk bangunannya, figur-figur permukaan bangunan, dan cara pemanfaatan pemandangan dilatar belakangnya. 3) Nilai kepentingan ruang terbuka dalam suatu lingkungan terbangun adalah karena ruang terbuka itu menjadi perkecualian. Sebagai contoh, bila perancang membuat suatu plaza disetiap bangunan kantor, maka plaza-plaza tersebut akan kehilangan arti sebagai ruang khusus. jadi nilai kepentingan dan keunikan ruang terbuka harus tetap diperhatikan, karena hubungan antara ruang terbuka dengan suatu bangunan penting adalah simbolis.

Yang dikatagorikan sebagai ruang-ruang terbuka pada pusat pemerintahan Kabupaten Dati II adalah lapangan upacara, parkir dan tata hijau. Ruang-ruang tersebut dimaksudkan untuk secara visual mempertinggi karakter kompleks pusat pemerintahan secara keseluruhan. Artinya, Pendekatan dari aspek ini ditujukan untuk memperkuat ~~kesan monumental yang akan mempertinggi nilai wibawah dan~~ keagungan kompleks pusat pemerintahan secara keseluruhan.

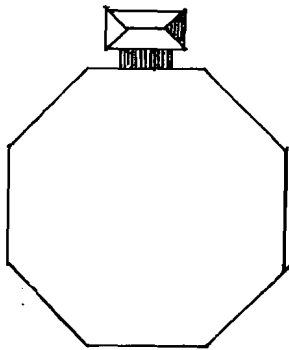
Ada dua cara utama untuk menghubungkan ruang terbuka dengan bangunan-bangunan penting. Yang pertama adalah merancang ruang terbuka di depan bangunan, yang memungkinkan struktur bangunan terlihat dan bahkan memamerkannya. Yang kedua adalah dengan benar-benar menepatkan

3) Robert M. Backley, Urban Design, Melalui Pengantar Perencanaan Kota, Erlangga, Jakarta, 1986, hal 107.

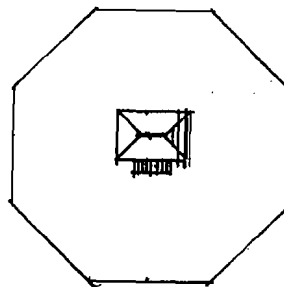


bangunan ditengah-tengah ruang terbuka. Dengan dua cara tersebut, simbolisme ruang akan tercapai.

dua alternatif hubungan ruang terbuka dengan bangunan penting yang simbolis



ruang terbuka di
depan bangunan



bangunan ditengah-
tengah ruang terbuka

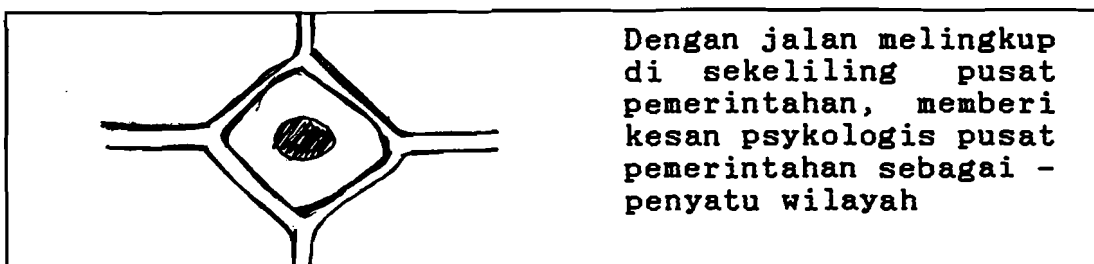
Sumber : Analisis

Pendekatan ketiga untuk mencapai monumentalitas, adalah dengan mengatur sistem sirkulasi di kompleks pusat pemerintahan, karena sistem sirkulasi yang membentuk jaringan transportasi maupun arah pencapaian mempunyai peranan penting dalam mempengaruhi kesan ruang, maka masalah ini akan diuraikan tersendiri dalam bagian sub bab di bawah ini.

3. Sistem Sirkulasi

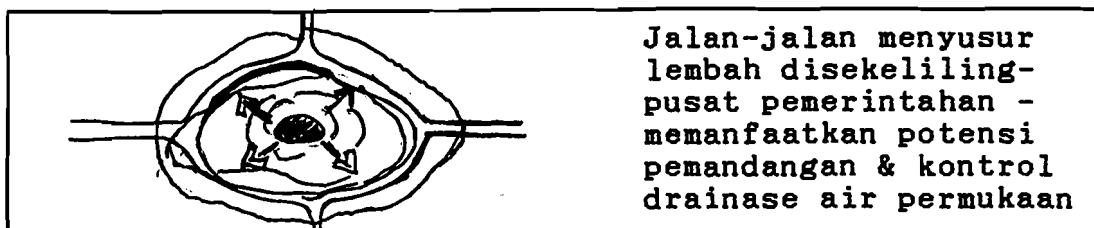
Dasar pemikiran dalam merencanakan sistem sirkulasi di kompleks pusat pemerintahan ini adalah tujuannya yakni yang mengarah pada kejelasan orientasi distribusi, keamanan, serta pencapaian yang jelas ke arah pusat pemerintahan. Ada suatu konsep suatu konsep pola jaringan trans-

portasi yang sangat mendukung fungsi pusat pemerintahan sebagai pusat orientasi. Dengan menggunakan konsep fasilitas pusat sebagai penyatu, akan memperkuat kesan pusat pemerintahan sebagai penyatu wilayah sekitarnya. Pola transportasi ini menganggap pusat pemerintahan sebagai fasilitas komunitas dan penduduk wilayah sekitarnya sebagai pusat komunitas. Maka fasilitas komunitas tersebut harus mudah dicapai dari segala arah kota. Hal tersebut dapat dicapai dengan suatu pola jaringan transportasi yang membengkok melingkupi pusat pemerintahan.

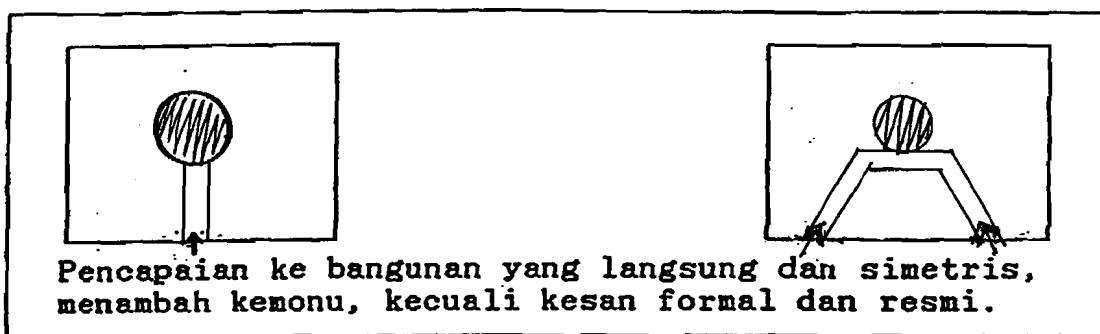


Sumber : Analisis

Pada kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Dati II yang berupa bukit dan lembah-lembah di sekitarnya, pola jaringan tersebut di atas sekaligus dapat dimanfaatkan sebagai pemandangan. Dan dengan menempatkan jalan-jalan menyusur lembah pada sekeliling pusat pemerintahan akan mempermudah dalam pengontrolan drainase air permukaan tanah.



Di dalam kompleks pusat pemerintahan, sistem sirkulasi diarahkan untuk menunjang pembagian ruang (zoning), sehingga jalan-jalan dalam kompleks pusat pemerintahan dapat mencerminkan fungsi masing-masing, sebagai jalan protokol, jalan harian, jalan service maupun jalan pengaman (pedestrian). Pencapaian masuk ke dalam bangunan kantor Bupati dapat menunjang kemonumentalan bangunan, yaitu dengan pencapaian yang simetris dan langsung.



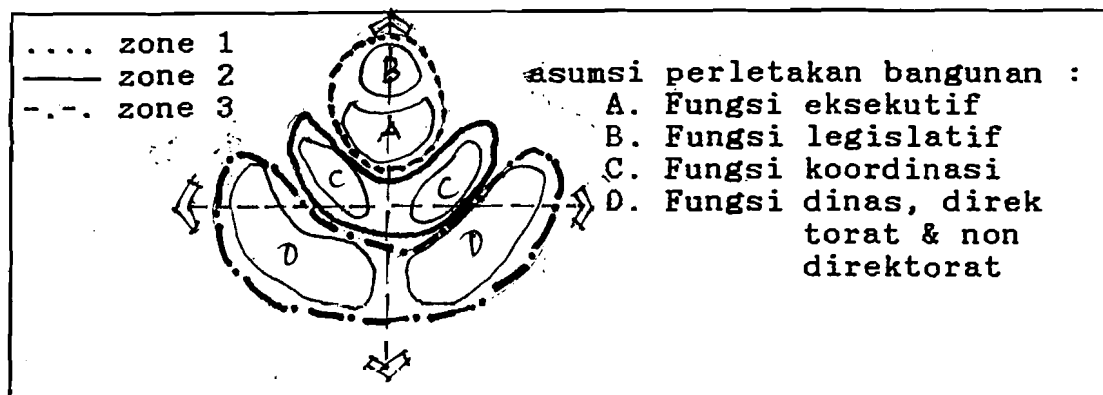
Sumber : analisis

C. Analisis Zonning, Site dan Lokasi bangunan pusat pemerintahan

Berdasarkan hirarki jabatan dalam kepemimpinan dan sifat pelayanan terhadap masyarakat, kompleks pemerintahan kabupaten Dati II Musi Banyuasin dapat di bagi dalam tiga sifat daerah (zonning), yaitu :

- Zonning I : untuk fungsi-fungsi legislatif dan eksekutif.
- Zonning II : untuk fungsi-fungsi koordinasi, seperti Bappeda, BP-7 atau Itwilda dan lain-lain.
- Zonning III : untuk fungsi-fungsi dinas, direktorat, non direktorat dan fungsi-fungsi yang bersifat umum lainnya.

Dengan batasan di atas, perletakan fungsi bangunan dalam kompleks pusat pemerintahan juga di dasarkan pada sistem pemerintahan seperti yang tercermin dalam struktur organisasi Pemerintah Daerah Tingkat II Musi banyuasin. Kantor Bupati diletakkan sebagai central (pusat orientasi) bangunan-bangunan sekitarnya. Dengan meletakkan kantor Bupati pada permukaan yang paling tinggi, seperti telah dibahas dalam Analisis Topograpi, akan memperkuat penampilan kantor Bupati pada permukaan paling tinggi. Di sekitar Kantor Bupati, baru ditempatkan fingsi-fungsi yang lain, seperti DPRD, Bappeda, BP-7, dinas-dinas dan instansi-instansi vertikal lainnya.



Sumber : Analisis

D. Analisis Ruang Bangunan

1. Kebutuhan Ruang, Hubungan Ruang dan Pengelompokan Ruang

a. Ruang dalam

Hubungan ruang yang terjadi di dalam kantor Bupati, diperoleh berdasarkan pada kebutuhan ruang yang di tuntutan oleh adanya kegiatan-kegiatan, persamaan sifat ruang,

serta keterikatan antar kegiatan. Keterikatan disini
maksudnya adalah sampai sejauh mana suatu kegiatan
memerlukan kedekatan secara fisik dengan kegiatan lain,
sehingga keduanya dapat saling menunjang.

Berdasarkan susunan hirarki jabatan dan struktur organisasi Pemerintah Daerah Tingkat II Musi Banyuasin serta hubungan antar ruang di atas, maka secara garis besar, ruang-ruang dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- bangunan kantor Bupati :

a. Kelompok Ruang Bupati :

- Ruang kerja Bupati
- Ruang tunggu
- Ruang tamu
- Ruang ajudan dan staf
- Ruang-ruang servis dan sirkulasi

b. Kelompok Ruang Sekretaris Wilayah Daerah :

- Ruang kerja Sekretaris Wilayah Daerah
- Ruang rapat
- Ruang tunggu
- Ruang tamu
- Ruang istirahat
- Ruang service dan sirkulasi

c. Kelompok Ruang Asisten Sekretariat Bidang Pemerintahan :

- Ruang asisten sekretaris
- Ruang staf asisten sekretaris
- Ruang kepala bagian pemerintahan

- Ruang kepala sub bagian pemerintahan

- Ruang administrasi bagian pemerintahan

- Ruang kepala bagian hukum, organisasi dan tata laksana

- Ruang kepala sub bagian hukum, organisasi dan tata laksana

- Ruang administrasi bagian hukum, organisasi dan tata laksana

- Ruang kepala bagian humas

- Ruang kepala sub bagian humas

- Ruang rapat

- Ruang tunggu

- Ruang simpan

- Ruang service dan sirkulasi

d. Kelompok Ruang Asisten Sekretariat Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Kesra

- Ruang asisten sekretaris bidang

- Ruang staf asisten sekretaris bidang

- Ruang kepala bagian perekonomian

- Ruang kepala sub bagian perekonomian

- Ruang administrasi bagian perekonomian

- Ruang kepala bagian pembangunan

- Ruang kepala sub bagian pembangunan

- Ruang administrasi bagian pembangunan

- Ruang kepala bagian kesra

- Ruang kepala sub bagian kesra

- Ruang administrasi bagian kesra

- Ruang rapat

- Ruang arsip

- Ruang tunggu

- Ruang simpan

- Ruang-ruang service dan sirkulasi

e. Kelompok Ruang Asisten Sekretariat Bidang Umum :

- Ruang asisten sekretaris bidang umum

- Ruang staf asisten sekretaris bidang umum

- Ruang kepala bagian keuangan

- Ruang kepala sub bagian keuangan

- Ruang administrasi bagian keuangan

- Ruang kepala bagian kepegawaian

- Ruang kepala sub bagian kepegawaian

- Ruang kepala bagian umum dan protokol

- Ruang kepala sub bagian umum dan protokol

- Ruang administrasi bagian umum dan protokol

- Ruang rapat

- Ruang tunggu

- Ruang arsip

- Ruang simpan

- Ruang-ruang service dan sirkulasi

Kecuali kelompok ruang untuk unit kerja Pemerintah Daerah, kantor Bupati kepala daerah Tingkat II Musi Banyuasin dilengkapi dengan gedung pertemuan/pendopo kabupaten. Kelompok-kelompok ruang yang termasuk dalam bangunan gedung pertemuan/pendopo kabupaten ini adalah :

a. Kelompok Ruang Pertemuan/balai kesenian

- Hall utama

- Ruang belakang panggung, pantry, gudang, toilet
- Ruang-ruang service dan sirkulasi

b. Kelompok Ruang Fasilitas Umum

- Gallery
- Kantin
- Musholla
- Koperasi
- Ruang olahraga
- Dharma wanita
- Ruang-ruang service dan sirkulasi

c. Kelompok Ruang Fasilitas penunjang

- Ruang pola/duta
- Ruang komputer
- Ruang pusat arsip
- Ruang pers
- Ruang jaga
- Ruang pengemudi
- Ruang eksekutif
- Ruang cetak
- Ruang perpustakaan
- Ruang service dan sirkulasi

Pada perencanaan kompleks pusat pemerintahan Kabupaten Dati II Musi Banyuasin di atas, untuk luas rencana-rencana yang kebutuhan luas lantainya sudah tertentu, koordinasi antara bangunan dan areal tanah dapat

~~dilakukan dengan sebaik-baiknya. Tetapi pada perhitungan angka kebutuhan luas lantai dan pengembangan dimasa~~

datang tidak dapat ditentukan secara pasti. Penentuan koordinasi antara besar bangunan dan tanah yang ada, akan ditinjau dari kemampuan tanah itu sendiri, dengan memperhatikan batasan/peraturan yang telah ditentukan. Pendekatan dari sudut ini diharapkan dapat menghasilkan besaran optimal sesuai dengan kondisi ruang.

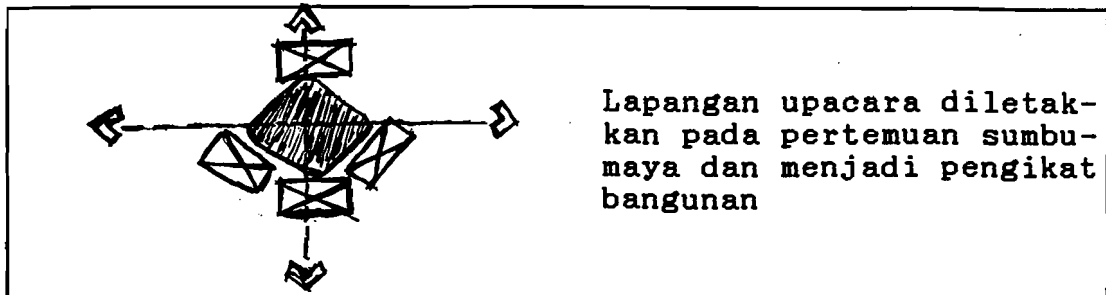
Perhitungan besar ruang dalam kantor Bupati di dasarkan pada standar kebutuhan fungsional, hirarki jabatan pemerintahan yang ada dan perkiraan jumlah personel. Perkiraan perhitungan luas masing-masing kelompok ruang dapat dilihat pada lampiran, yaitu luas masing-masing kelompok adalah sebagai berikut :

1. Kelompok Ruang Bupati : ± 335 M²
2. Kelompok Ruang Sekretaris Wilayah Daerah : ± 174 M²
3. Kelompok Ruang Asisten Sekretaris Bidang Pemerintahan:
± 738 M²
4. ~~Kelompok Ruang Asisten Sekretaris Bidang Ekonomi,~~
Pembangunan dan Kesra : ± 1000 M²
5. Kelompok Ruang Asisten Sekretaris Bidang Umum : ± 1730
M²
6. Kelompok Ruang Pertemuan/Balai Kesenian : ± 900 M²
7. Kelompok Ruang Fasilitas Umum : ± 725 M²
8. Kelompok Ruang Fasilitas penunjang : ± 944 M²

b. Ruang Luar

- Lapangan Upacara

Untuk mempertinggi nilai simbolis dan monumental keseluruhan tapak, lapangan upacara dapat diletakkan pada pusat seluruh kompleks pusat pemerintahan, yaitu pada titik pertemuan sumbu-sumbu maya Utara-Selatan serta barat-Timur. Sehingga lapangan upacara dapat menjadi pengikat keseluruhan bangunan tapak.



Sumber : Analisis

Kebutuhan luas lapangan upacara, diasumsikan seluas lapangan sepakbola, yaitu : $\pm 4.500 \text{ M}^2$

- Ruang parkir

Sesuai dengan sifat manusia yang selalu menginginkan kedekatan dalam mencapai suatu tempat, ruang parkir disebar atas beberapa kelompok bangunan yang setara hirarki fungsionalnya. Dengan kata lain, ruang parkir pada kompleks pusat pemerintahan kabupaten Dati II Musi Banyuasin tidak di-pool hnaya pada satu tempat saja.

perhitungan kebutuhan luas ruang parkir kendaraan dilakukan berdasarkan standar yang berlaku di Sumatera Selatan (dengan asumsi bahwa kota baru relatif dekat dengan kota Palembang). Standar ruang tersebut adalah sebagai berikut :

-
- Standar bangunan perkantoran : 1 mobil/100 M² luas bangunan.
-

- Luas ruang yang dibutuhkan untuk 1 mobil yang parkir : 15 - 23 M²

Sehingga kebutuhan ruang parkir untuk kantor bupati dan pendopo/gedung pertemuan dapat dihitung : (lihat lampiran).

- Luas ruang parkir untuk kantor bupati, minimal 600 M.
- Luas ruang parkir untuk pendopo, minimal 390 M.

Tetapi dengan perhitungan luas lahan yang ada dan penggunaan BC secara maksimal (60% - 80%), maka ada kemungkinan sebagian ruang parkir diletakan pada lantai basement/semi basement, mengingat efisiensi penggunaan lahan dan kondisi topografinya.

- Tata hijau

Tata hijau untuk kompleks pusat pemerintahan dapat dimanfaatkan untuk fungsi-fungsi :

- a. Pembentukan suasana, yaitu untuk memperkuat kesan monumental dan formal seluruh kompleks pusat pemerintahan.
- b. Memberi kesan visual, terutama pada faktor hubungan antar besar bangunan dan jarak penikmatan. Peranan kesan visual ini penting untuk diperhatikan, supaya bangunan-bangunan yang sudah direncanakan, betul-betul dapat dinikmati secara visual.
- c. Pelindung, karena besarnya kebutuhan ruang parkir, akan menyebabkan pelataran yang diperlukan menjadi luas.



~~Area perkerasan harus diimbangi dengan penghijauan, terutama dalam fungsi perlindungan terhadap radiasi~~

panas dan pantulan cahaya. Untuk itu sepanjang jalur sirkulasi dan ruang-ruang parkir dapat ditanami pohon-pohon pelindung.

- d. Taman-taman, unsur ini diperlukan sebagai pelengkap estetis pada seluruh kompleks pusat pemerintahan. Letak taman terbesar pada masing-masing bagian kelompok bangunan.

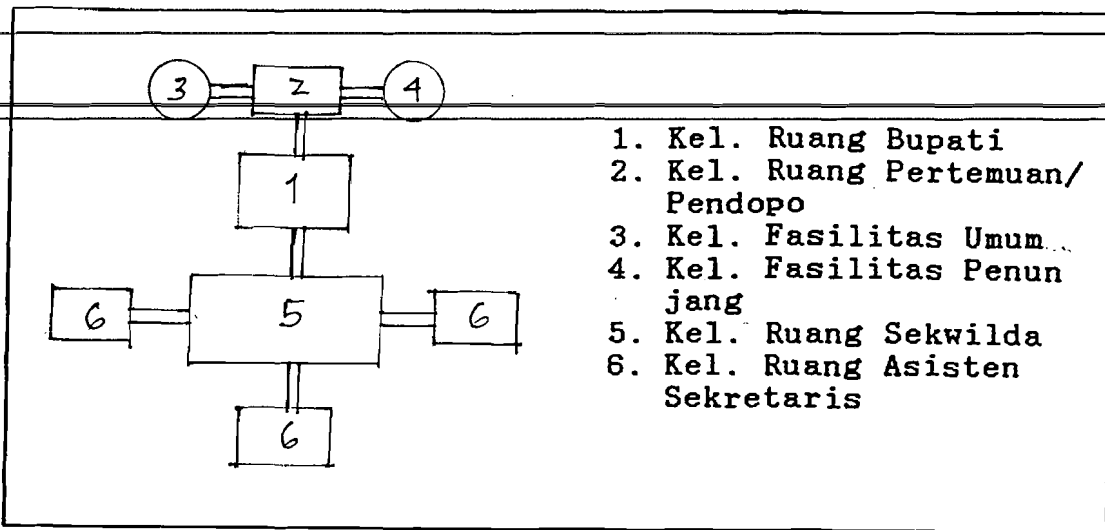
Sesuai dengan fungsinya, keseluruhan tata hijau di atas dibagi dalam :

- Ruang hijau terbuka yang berupa taman-taman.
- Jalur hijau sebagai pelindung, pembatas maupun pengarah.

Kebutuhan ruang untuk tata hijau, disesuaikan dengan jumlah lahan yang ada, dengan memperhatikan batasan-batasan yang telah ditentukan, misalnya tentang BC, FAR dan sebagainya.

2. Sistem Sirkulasi

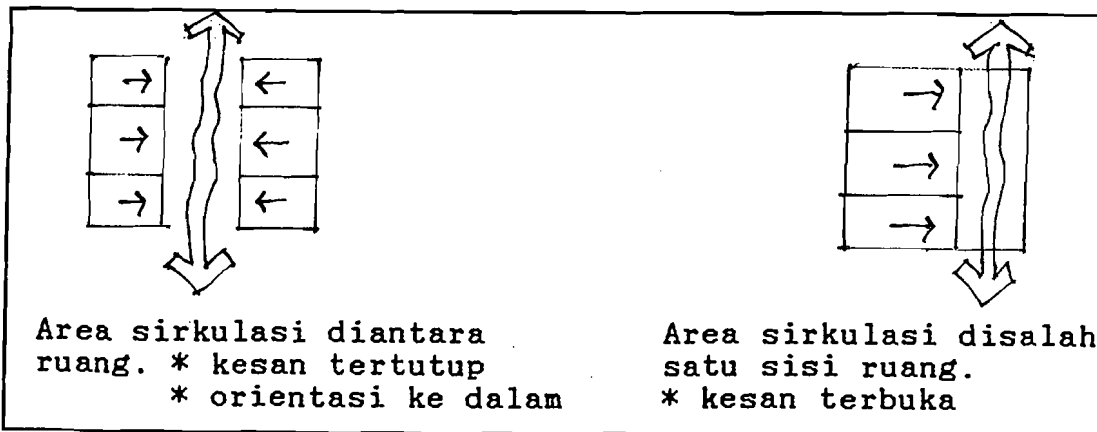
Dalam susunan tata kerja Pemerintahan Daerah Tingkat II, Bupati mempunyai 'tangan-tangan' kerja yang siap membantu melaksanakan roda pemerintahan di daerah. sehingga Bupati harus dapat menjadi koordinator tiap-tiap bagian yang membantunya tersebut. Keadaan ini diwujudkan dalam bentuk hubungan antar kelompok ruang dan sistem sirkulasinya.



Sumber : Analisis

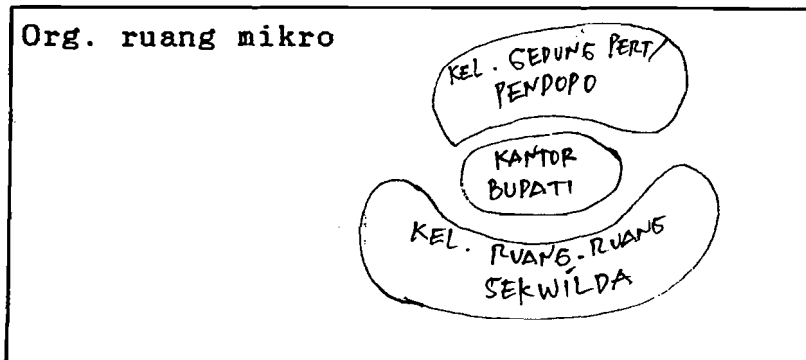
Karena fungsinya sebagai wadah pelayanan bagi masyarakat, maka diharapkan adanya suatu alternatif area sirkulasi khususnya yang menghubungkan ruang-ruang. Dengan adanya area sirkulasi tersebut, pergerakan pelaku-pelaku kegiatan dapat mengalir dan terkontrol.

Ada dua cara yang dapat ditempuh dalam rancang area sirkulasi ini, yaitu pertama dengan menempatkan area sirkulasi diantara ruang-ruang dalam bangunan, dan kedua, area sirkulasi diletakan pada satu sisi ruang dalam bangunan.



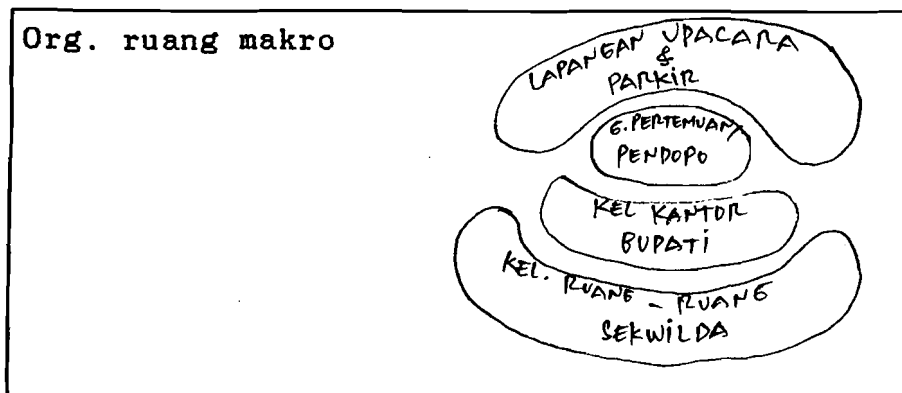
3. Organisasi Ruang

- Secara mikro, organisasi ruang yang digunakan sesuai dengan hirarki tata kerja dalam struktur organisasi Pemerintahan Daerah Tingkat II Musi Banyuasin. Pertimbangan ini sesuai dengan tingkat hubungan ruang yang didasarkan pada kebutuhannya.



Sumber : Analisis

- Secara makro, dengan ruang luar, Kantor Bupati harus membentuk suatu pola organisasi yang harus terbuka, humanis (sebagai lembaga pelayanan masyarakat) tetapi harus juga tetap berwibawa, monumental (sebagai suatu lembaga resmi negara).



Sumber : Analisis

4. Kualitas Ruang

a. Suasana

Ruang-ruang di dalam Kantor Bupati kepala Daerah Tingkat II Musi Banyuasin harus mencerminkan suasana yang sesuai dengan sifat dari fungsinya. Adanya dia bagian sifat yang sesuai dengan fungsinya, yaitu bagian yang formal dan semi formal.

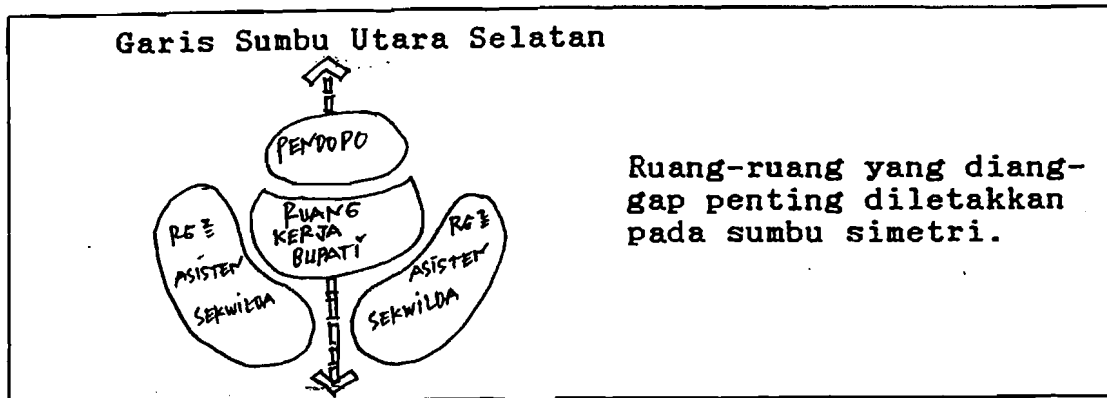
Pada bagian yang formal harus mencerminkan suasana resmi dan berwibawa, yaitu pada kelompok ruang kantor Bupati. Sifat ini sesuai dengan fungsi sebagai lambang suatu lembaga negara. Suasana formal dan berwibawa tersebut dapat dipancarkan dengan pengaturan ruang-ruang yang simetris sesuai dengan hirarki tata kerja atau jabatan pelaku kegiatan.

Sedang bagian semi formal, yaitu pada bagian pelayanan, harus mencerminkan suasana ramah dan akrab, karena fungsinya sebagai lembaga yang melayani masyarakat banyak. Suasana tersebut dapat diturunkan dari adanya bentuk-bentuk yang dinamis dan tidak kaku, dalam konfigurasi ruang pada bentuk bangunan.

b. Pandangan

Sebagai konsekwensi dari penggunaan konsep simetri yang dibentuk dari sumbu-sumbu maya, pengaturan ruang-ruang di dalam Kantor Bupati juga harus mencerminkan tanggung jawab penggunaan konsep tersebut. Maka, dalam perancangan, untuk ruang-ruang yang dianggap mempunyai

nilai kepentingan tinggi di dalam Kantor Bupati, dapat diletakkan pada garis sumbu simetri tersebut. Secara tidak langsung, view yang dibuat adalah ke arah sejajar dengan garis sumbu. Sedang untuk ruang-ruang selain itu dapat diletakkan secara simetris di luar garis sumbu dengan pandangan/view yang lebih bebas.



Sumber : Analisis

Nilai pentingnya ruang, dalam hal ini diukur dari jabatan pelaku kegiatan utama dalam ruang dan fungsi ruang tersebut dalam keseluruhan fungsi bangunan Kantor Bupati.

E. Analisis Ungkapan Fisik Bangunan

1. Bentuk Bangunan

Merupakan perwujudan wadah fisik kegiatan suatu lembaga negara yang dapat mencerminkan kegiatan-kegiatan di dalamnya dan nilai-nilai yang ada.

a. Bentuk Ruang

- Fungsi ruang, yaitu berdasarkan kegiatan utama pada ruang, yang diterjemahkan dalam bentuk/wujud ruang horizontal atau vertikal. Berdasarkan fungsi ruang

ini, untuk menentukan bentuk dasar adalah dengan menggaransir gerak kegiatan utama dan perabot yang digunakan.

- Kualitas pandang, yaitu dengan membuat bentuk yang dapat memperkuat terwujudnya komunikasi visual antara sisi dalam pada massa. Hal ini dinilai penting untuk mencapai kejelasan orientasi bagi staf/karyawan dan masyarakat yang akan masuk ke dalam bangunan. Kecuali itu bentuk harus menunjang penggunaan konsep simetris dengan segala konsekwensi dalam susunan tata ruang yang menentukan arah pandangan/view.

b. Penampilan Arsitektural Bangunan

Penempatan suatu bangunan di dalam lingkup secara tidak langsung akan membentuk suatu hubungan dengan ruang sekitarnya, termasuk dalam lingkup wilayah kota. Dalam Urban Design, dikenal 4 determinan arsitektur yang memberi/menekankan batasan-batasan fungsi bangunan dalam kota yaitu 4:

- **Bangunan sebagai generator kegiatan**

Disini dinamika kota dijalankan melalui bangunan yang menampung kegiatan tertentu.

- **Bangunan sebagai elemen penentu ruang**

Bangunan dianggap sebagai pengisi ruang yang mempunyai kekuatan yang memancar ke ruang sekitarnya

4. Robert M. Beckley, *Urban Design melalui Pengantar Perencanaan Kota*, Erlangga, Jakarta 1986, Hal. 118-119.

atau kebenda-benda yang berhubungan dengan ruang yang ditempatinya. Dalam hal ini dampak dari kekuatan itu sangat tergantung pada bangunan itu sendiri.

- Bangunan sebagai titik pusat dan landmark

Determinan ini sesuai dengan kerangka bayangan kota dari Kevin Lynch, yaitu bangunan mempunyai peranan penting sebagai titik pusat dan landmark. Peranan bangunan sebagai titik pusat berasal dari fungsinya sebagai penampung aktivitas. Aktivitas berintensitas tinggi yang ditampung atau ditimbulkan oleh bangunan, melimpah ke kawasan sekitarnya. Aktivitas tersebut cenderung untuk menimbulkan lebih banyak aktivitas. Bangunan dapat berfungsi baik sebagai titik pusat aktifitas semacam itu, dalam arti sebenarnya, atau menjadi titik pusat secara simbolis. Suatu bangunan dapat menjadi landmark, bila terletak pada lokasi yang penting dan mempunyai bentuk yang berarti. Atau dengan kata lain, harus ada bangunan-bangunan lain yang kurang penting supaya sebuah bangunan dapat menonjol dalam pemandangan kota masa kini yang sering dikatakan kekurangan landmark, itu bukan karena tidak ada bangunan yang kurang penting, tapi justru terlalu banyaknya bangunan penting yang saling berlomba untuk menjadi paling menonjol.

- Bangunan sebagai batas dan muka

Di dalam kota, bangunan tersebut berfungsi sebagai tembok dan sebagai perabotnya. Kota dibentik dari

bangunan-bangunan di latar belakang dan bangunan pengisinya.

Bangunan Kantor Bupati di kompleks pusat Pemerintahan kabupaten Dati II Musi Banyuasin yang direncanakan, berada pada suatu area yang baru, dalam arti belum ada bangunan lain di lingkungan sekitar. Sehingga determinan bangunan sebagai landmark wilayah tidak dapat digunakan untuk pendekatan perancangan. Tetapi, bagaimanapun tetap diharapkan bahwa bangunan Kantor Bupati tersebut nantinya menjadi landmark lingkungan, mengingat fungsi dan kedudukannya dalam kompleks pusat pemerintahan.

Determinan arsitektur dalam Urban Design yang dapat diterapkan, terutama adalah menganggap Kantor Bupati sebagai titik pusat kota. Walaupun secara fungsional Kantor Bupati dalam kompleks pusat pemerintahan tidak mempunyai intensitas aktifitas yang tinggi, secara simbolis dari kantor Bupati inilah seluruh kegiatan -- pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan -- dalam wilayah Kabupaten Dati II Musi Banyuasin berpusat.

Kecuali itu, Kantor Bupati dapat dianggap sebagai elemen penentu ruang, yang mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi dan menjadi pedoman pembangunan di sekitarnya. Namun, di dalam kesatuan ekspresi sebagai kompleks pusat pemerintahan, setiap bangunan harus tetap menampilkan hirarki yang sesuai dengan fungsi bangunan.

~~Di wilayah kabupaten Dati II Musi Banyuasin saat ini, tidak ada satu bentuk arsitektur lokal yang dapat dipakai sebagai batasan dalam menampilkan bangunan dengan ciri setempat. Satu-satunya indikasi kota yang tepat bagi Kabupaten Musi Banyuasin adalah, ia merupakan suatu kota yang berkembang cukup pesat karena letaknya diantara wilayah kota Palembang dan berbatasan dengan wilayah Propinsi Jambi. Keadaan tersebut cukup jelas terlihat dari kemajemukan arsitektur yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin saat ini.~~

Maka untuk mendapatkan satu warna arsitektur sebagai batasan, diambil nilai-nilai Arsitektur Daerah Sumatera Selatan.



Sumber : Rumah seri adat - TMII

Kecuali dengan pertimbangan bahwa Musi Banyuasin termasuk di dalam wilayah Sumatera Selatan, batasan di atas sekaligus digunakan sebagai alat untuk memperlihatkan bahwa Musi Banyuasin merupakan daerah yang sepenuhnya masih dalam wilayah Sumatera Selatan.

Pendekatan di atas tidak lepas dari salah satu dasar perkembangan arsitektur saat ini, yaitu kemajuan teknologi yang sangat pesat. Maka untuk mendapatkan bentuk arsitektur bangunan Kantor Bupati Kabupaten Dati II Musi Banyuasin saat ini, dalam struktur maupun bahan.

2. Sistem Struktur dan Utilitas

Sistem struktur bangunan merupakan pendukung dalam mewujudkan bentuk bangunan. Untuk menentukan sistem struktur bangunan yang dipakai, digunakan pertimbangan-pertimbangan :

- Fungsi ruang, berkaitan dengan luas ruang yang diperlukan untuk mewadahi kegiatan yang selanjutnya akan menentukan panjang bentang dan modul struktur yang dipakai.
- Bentuk penampilan, berkaitan dengan konstruksi bangunan yang menjadi kerangka terwujudnya bentuk penampilan yang selanjutnya akan menentukan sistem struktur yang dipilih.
- Fungsi struktur, berkaitan dengan sistem struktur itu sendiri, sebagai bagian yang menjamin keamanan, atau dapat juga digunakan sebagai alat mengekspresikan karakter ruang.
- Kemudahan pelaksanaan konstruksi, berkaitan dengan peralatan, kemampuan tenaga dan waktu pelaksanaan pekerjaan struktur. Masalah ini menyangkut pada kesederhanaan struktur yang dipilih.
- Material konstruksi, berkaitan dengan bahan bangunan dalam membentuk sistem struktur.



~~Utilitas yang menjadi bagian penting untuk peren-~~
~~canaan pusat pemerintahan adalah rencana jaringan listrik~~
dan telepon, serta jaringan air minum. Pada Kantor Bupati
Kepala Daerah Tingkat II Musi Banyuasin semua fasilitas
utilitas tersebut digunakan dan dapat diambil dari
fasilitas kawasan yang bersangkutan, yang sudah tersedia.

BAB IV

KONSEP PERENCANAAN DAN PERANCANGAN

A. Konsep Perencanaan

1. Konsep tata ruang kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Dati II Musi Banyuasin di Sumatera Selatan

a. Perwujudan tata ruang pusat pemerintahan di Sekayu dapat mencerminkan suasana :

1. Adanya kejelasan orientasi tata ruang.
2. Adanya keindahan yang terwujud dari potensi alam yang dipertahankan.
3. Penerapan teknik pengembangan yang sesuai dengan kondisi fisik lahan, yang secara tidak langsung akan berpengaruh pada upaya penghematan biaya perawatan.

b. Penataan fungsi dalam kawasan, mempertimbangkan:

1. Topografi
2. Luas ruangan yang dibutuhkan setiap fungsi.
3. Hubungan antar fungsi.

c. Sistem lay out/tata ruang kompleks pusat pemerintahan, mencerminkan nilai-nilai :

1. Accesibilitas, yaitu kemudahan pencapaian dari segala penjuru kota.
2. Stabilitas, yaitu pemantapan dan keamanan pusat pemerintahan dari tarikan pusat kota lain.

3. Orientasi, yaitu sebagai titik orientasi yang menjadi pedoman, penggerak dan pengarah proses pembangunan disekitarnya.

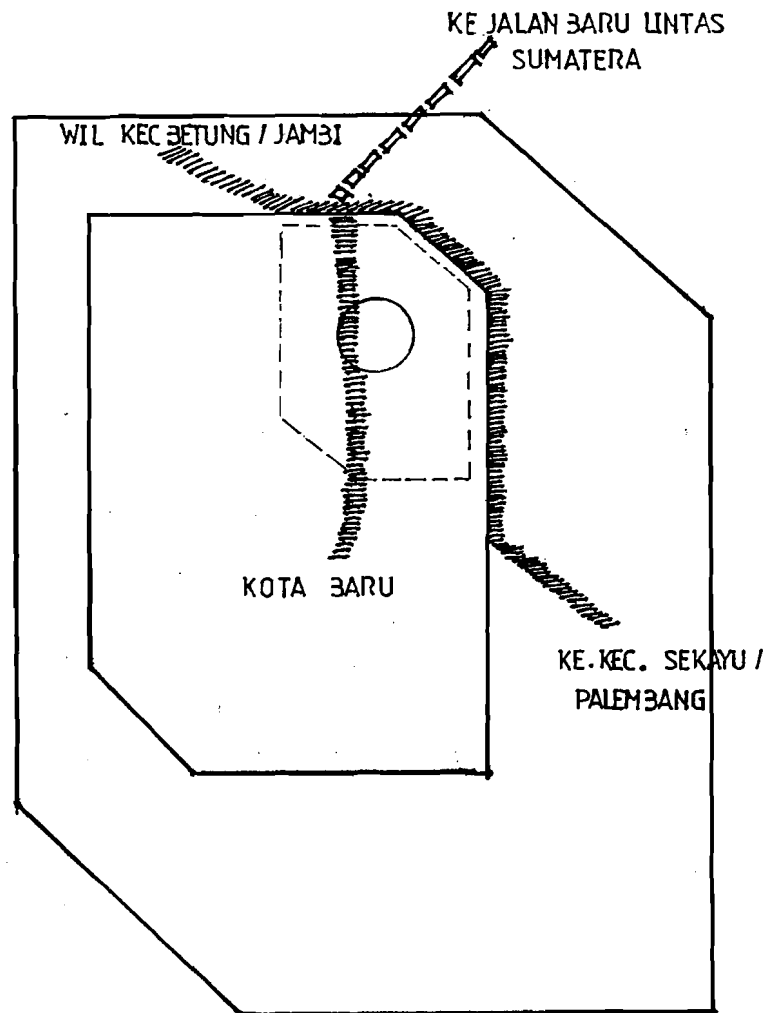
4. Integritas, yaitu kesatuan antara nilai-nilai yang harus dipancarkan sesuai dengan fungsinya sebagai pusat pemerintahan dan kondisi yang membatasinya.





Dari nilai-nilai di atas, konsep simetri dapat dikembangkan lebih jauh. Garis sumbu maya arah Utara-Selatan dan Timur-Barat dipakai sebagai garis sumbu daerah perencanaan pada tapak, garis sumbu tersebut yang akan menjadi pedoman pembentukan pola tata ruang dan tata letak bangunan dalam tapak, serta menjadi dasar penggunaan prinsip simetri pada tapak.

2. Konsep keterkaitan pusat pemerintahan dengan wilayah sekitarnya.....

DILANJUTKAN PADA
HALAMAN BERIKUTNYA

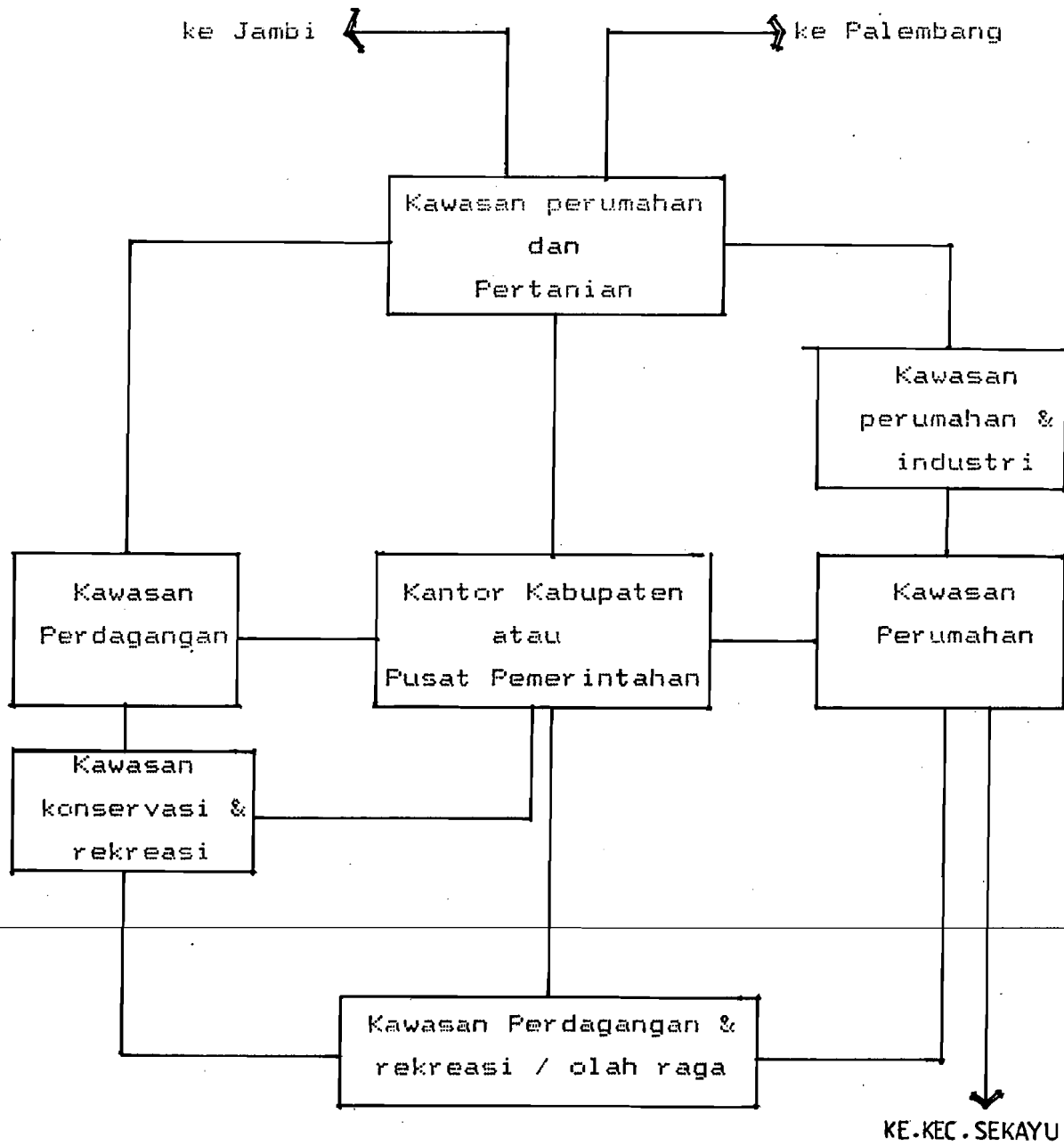
Konsep keterkaitan Kawasan Pusat Pemerintah
 Dengan Kota Sekayu Dan Kabupaten Musi Banyuasin



-  Pusat Pemerintah
-  Kawasan Pusat Kota Baru
-  Jalan Yang Sudah Ada
-  Rencana Jalan Tembus Lintas Sumatera

Kawasan pusat pemerintahan terletak diantara Wilayah kecamatan Sekayu dan diantara kota Baru Ibu kota Sekayu yang relatif dekat (1-2 km) dengan jalan tembus lintas Sumatera

Konsep keterkaitan Kawasan Pusat Pemerintahan dengan kawasan lain



* Pusat pemerintahan terletak pada Central yang menjadi - pusat kawasan lain

3. Konsep pemanfaatan pemandangan dan topografi

Pusat pemerintahan yang terletak pada permukaan

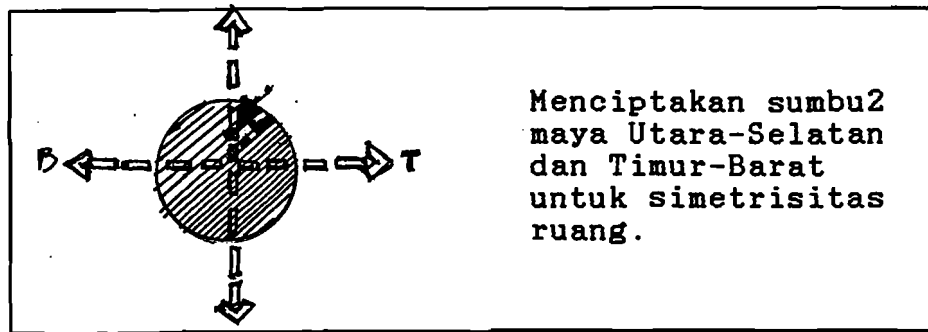
lahan paling tinggi dalam kawasan, memanfaatkan sepenuhnya unsur pemandangan dan topografi :

- a. Memanfaatkan pemandangan sungai sebagai unsur-unsur pembentuk sumbu-sumbu maya Utara-Selatan dan Timur-Barat.
- b. Memanfaatkan sungai untuk menunjang penampilan bangunan.
- c. Topografi yang landai dimanfaatkan untuk perencanaan transportasi, yaitu dengan menempatkan jalan-jalan menyusur sungai pada pinggiran pusat pemerintahan, kecuali untuk menambah kesan monumental juga untuk mempermudah pengontrolan drainase muka air tanah.
- d. Topografi lahan dimanfaatkan untuk penataan fungsi-fungsi bangunan, sesuai dengan hirarki yang tercermin dalam struktur organisasi pemerintahan Kabupaten Dati II MUsi Banyuasin.
- e. Apabila ada perubahan permukaan lahan yang tak dapat dihindari, perubahan permukaan lahan di-jaga agar tidak merubah karakter dasar yang ada.
- f. Kantor Bupati diletakkan pada lahan yang tertinggi Pada titik pertemuan sumbu Utara-Selatan dan Timur-Barat.

4. Konsep Kejelasan Orientasi

Titik orientasi merupakan titik pertemuan sumbu-sumbu maya Utara-Selatan dan Timur-Barat :

- a. Kejelasan orientasi berpengaruh pada simetrisitas ruang dan bangunan.
- b. tata orientasi dalam kawasan dan kompleks pusat pemerintahan menggunakan konsep simetris, yang dibentuk dari sumbu-sumbu maya tersebut.



* Konsep

- c. Perletakan bangunan/ruang berdasarkan pada nilai kepentingan bangunan/ruang terhadap pusat pemerintahan.

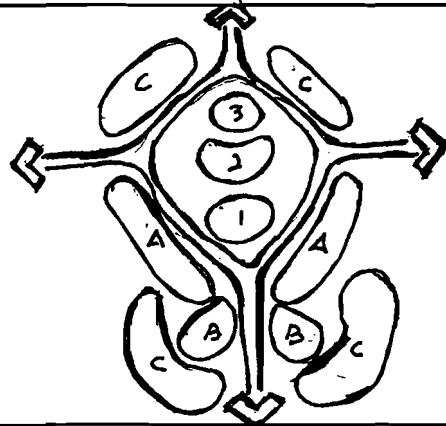
- Bangunan Kantor Bupati, ruang terbuka dan gedung DPRD yang merupakan wadah pelaku fungsi eksekutif dan legislatif diletakan tepat pada garis sumbu maya.
- Fungsi-fungsi pusat pemerintahan yang lain, berada diluar garis sumbu maya dan berorientasi kekelompok bangunan di atas atau kearah garis sumbu maya.
- Fasilitas-fasilitas kota yang muncul karena adanya pusat pemerintahan baru ini adalah

pusat perdagangan, masjid, gereja, gedung olahraga yang simetris terhadap garis sumbu maya. Bangunan-bangunan tersebut juga membentuk pola yang simetris terhadap garis sumbu maya.

tata orientasi :

1.2.3 Ruang + bangunan - pusat pemerintahan yang dianggap penting diletakan pada sumbu maya.

- A. Fasilitas penunjang pusat pemerintahan.
- B. Fasilitas pusat kota
- C. Pusat perdagangan dan lain-lain.



* Konsep

- d. Simetrisitas menghasilkan bentuk yang teratur dan memberikan kesan resmi pada kantor bupati, sesuai dengan nilai formalitas yang harus dipancarkan sebagai suatu lembaga negara.

5. Konsep Monumentalitas

Kesan monumental diperlukan bagi bangunan pusat pemerintahan. Kesan monumental tersebut dapat dicapai melalui :

a. Perancangan bangunan.

- Bentuk/profil bangunan : ukuran-ukuran yang tidak umum, berbeda dengan lingkungan.
- Figur permukaan bangunan : penggunaan unsur vertikal pada permukaan bangunan.

- Latar belakang bangunan : membuat keseimbangan yang indah dengan bangunan.

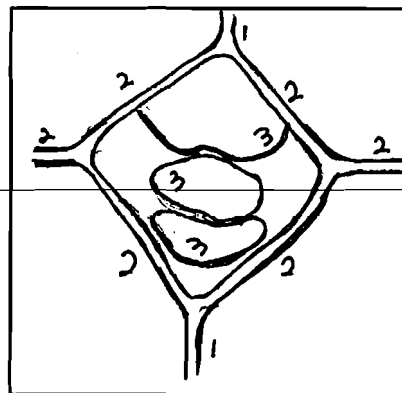
b. Pengaturan ruang-ruang terbuka.

- Lapangan upacara sebagai pengikat massa-massa bangunan.
- Lapangan upacara sebagai ruang terbuka, diletakan didepan bangunan kantor bupati, yang memungkinkan struktur bangunan terlihat.

c. Pengaturan sistem sirkulasi.

6. Konsep sirkulasi

- a. Memberikan kemudahan pencapai dari/keruang-ruang yang ada di sekitarnya.
- b. Perencanaan transportasi pusat pemerintahan menggunakan konsep fasilitas pusat sebagai penyatu :



1. Jalan protokol sebagai gerbang masuk pusat pemerintahan.
2. Jalan arteri sekunder sebagai batas-batas pusat pemerintahan.
3. Jalan lokal dibuat dengan pola sesuai zoning ruang.

* Konsep

- Jalan protokol/arteri untuk mencapai kompleks pusat pemerintahan.
- Jalan arteri sekunder pada batas-batas pusat pemerintahan, sebagai penyatu yang jelas kompleks pusat pemerintahan.

c. Sistem sirkulasi diharapkan mewujudkan keteraturan ruang, orientasi dan keteraturan lalu lintas.

d. Di dalam kompleks pusat pemerintahan, sistem sirkulasi diarahkan untuk menunjang pembagian ruang (zoning).

e. Sirkulasi pencapaian ke bangunan : langsung dan simetris.

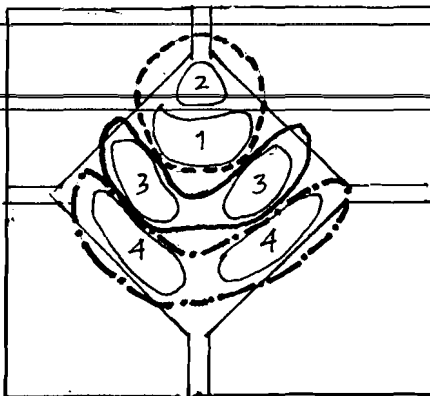
7. Konsep Zoning

a. Berdasarkan hirarki jabatan dalam kepemimpinan dan sifat pelayanan terhadap masyarakat, kompleks pusat pemerintahan dibagi dalam tiga sifat daerah (zoning) :

- Zoning I : fungsi legislatif (DPRD) dan fungsi eksekutif (kantor Bupati dan Setwilda dan pendopo Kabupaten), merupakan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang tertinggi. Meliputi seluruh bidang pelayanan.

- Zoning II : fungsi-fungsi koordinasi (Bappeda, BP-7, dan Itwilda), merupakan fungsi-fungsi pembantu eksekutif dan bertanggung jawab langsung kepada kepala daerah.

b. Peletakan bangunan dalam kompleks pusat pemerintahan berdasarkan sistem pemerintahan seperti yang tercermin dalam struktur organisasi :



1. Kantor Bupati > eksekutif+
2. DPRD > legislatif
3. Fungsi koordinasi (eks)
4. Fungsi Dinas, Direktorat dan non Direktorat.

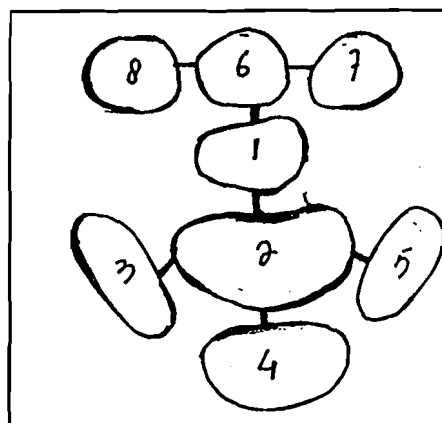
--- zonna : 1
 — zonna : 2
 -.- zonna : 3

* Konsep

B. Konsep Perancangan

1. Konsep Tata Ruang Dalam

- a. Hubungan ruang didasarkan pada kebutuhan ruang yang dituntut oleh adanya kegiatan-kegiatan, persamaan sifat ruang, serta keterikat atas kegiatan.
- b. Pengelompokan ruang berdasarkan susunan hirarki jabatan, struktur organisasi dan hubungan ruang.
- c. Perhitungan luasan ruang berdasarkan standar luas ruangan, perkiraan kebutuhan fungsional, hirarki jabatan pemerintahan dan perkiraan jumlah personal.
- d. Organisasi ruang mikro, sesuai dengan hirarki jabatan dalam susunan pemerintahan :

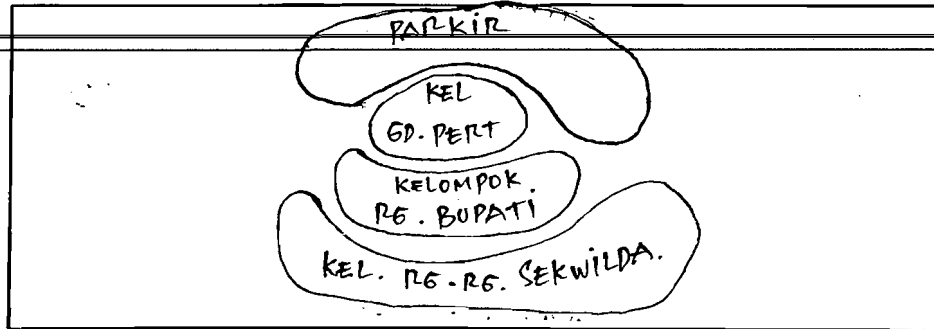


1. Kel. Ruang Bupati
2. Kel. Ruang Setwilda
3. Kel. Ruang Sekr. Bidang Pemerintahan
4. Kel. Ruang Sekr. Bid. Pembangunan
5. Kel. Ruang Sekr. Bid. Umum.
6. Kel. Ruang Pertemuan.
7. Fasilitas Umum.
8. Fasilitas Khusus.

* Konsep

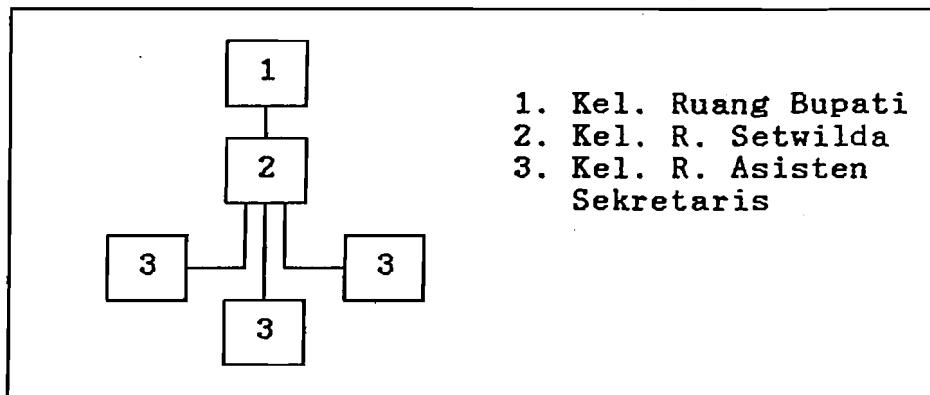


e. Secara makro, dengan ruang luar :

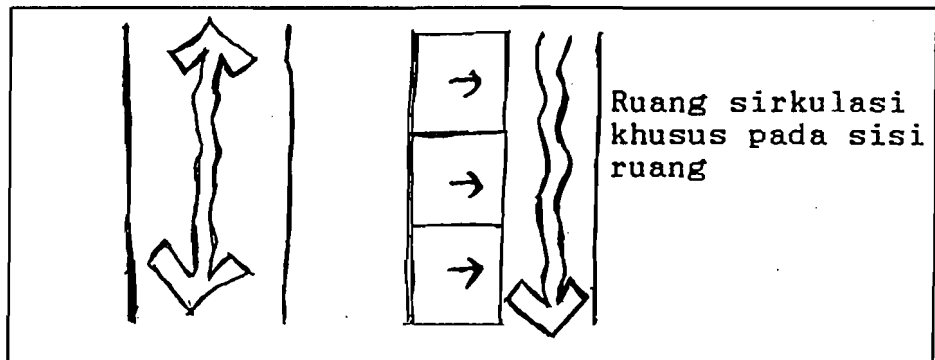


2. Konsep Sirkulasi

a. Sirkulasi kegiatan antar kelompok ruang, berdasarkan hubungan tata kerja :



b. Ada area sirkulasi khusus yang menghubungkan ruang-ruang :



3. Konsep suasana

kantor Bupati harus mencerminkan suasana yang sesuai dengan sifat dan fungsinya :

- Resmi dan formal, sebagai lembaga pemerintah/negara dipancarkan dengan pengaturan ruang-ruang yang simetris.
- Akrab dan terbuka, yang merupakan penurunan sifat semi formal sebagai lembaga pelayanan masyarakat, diturunkan dalam bentuk-bentuk yang dinamis dan tidak kaku dalam konfigurasi ruang pada bentuk bangunan.

4. Konsep pandangan dalam tata ruang

Pandangan dalam tata ruang merupakan konsekwensi dari penggunaan konsep simetri :

- Ruang-ruang yang dianggap mempunyai nilai kepentingan tinggi di dalam kantor Bupati, diletakkan pada garis sumbu simetri, dengan view kearah sejajar dengan sumbu simetri.
- Nilai kepentingan diukur dari jabatan pelaku kegiatan utama dalam ruang dan fungsi ruangnya.

5. Konsep Ruang Luar

a. Ruang parkir :

- Ruang parkir tersebar pada kelompok bangunan yang setara hirarki fungsionalnya.
- perhitungan luas ruang parkir menggunakan standar seperti yang berlaku pada bangunan perkantoran di Palembang.

~~Ada kemungkinan sebagian ruangan parkir diletakkan pada lantai basemant/semi basemant~~

jika perhitungan BC dan luas lahan tidak memungkinkan.

b. Tata Hijau, berfungsi sebagai :

- Pembentuk suasana.
- Memberi kesan visual.
- Pelindung, pembatas, pengarah.
- taman-taman.

6. Konsep Bentuk Ruang

Bentuk ruang merupakan penurunan dari :

- Fungsi ruang : berdasarkan kegiatan utama, dengan menggaransi kegiatan utama dan perabot dalam ruang.
- Kualitas pandang : Bentuk yang memperkuat terwujudnya komunikasi visual antara sisi dalam pada massa.

7. Konsep Penampilan Arsitektural Bangunan

a. Bangunan sebagai elemen penentu ruangan

- mempunyai pengaruh yang kuat untuk menjadi pedoman pembangunan sekitarnya.
- Bentuk bangunan harus kelihatan kokoh, yang memperlihatkan suatu usaha untuk melindungi dan menjadi pedoman pembangunan di sekitarnya.

b. Sebagai unsur citra, bangunan Kantor Bupati dianggap sebagai titik pusat.

~~c. Warna arsitektur, mengambil dari nilai-nilai arsitektur daerah Sumatera Selatan.~~

d. Penampilan yang diturunkan dari sifat-sifat umum sebagai bangunan pusat pemerintahan :

- Bentuk yang teratur dan simetris, memperlihatkan kestabilan seperti yang terlihat pada pusat pemerintahan.
- Mencerminkan karakter formal, sesuai dengan sifat bangunan sebagai suatu lembaga negara, tetapi akrab dan terbuka sesuai dengan sifat pelayanannya.

e. Pendekatan dari melihat, kondisi fisik dan lingkungan mendapatkan bentuk arsitektur bangunan :

- Memanfaatkan pemandangan sebagai latar belakang penampilan bangunan.
- Memperhitungkan iklim dan topografi lahan.
- mengikuti perkembangan teknologi pembangunan saat ini.
- Tinggi bangunan sesuai dengan batasan/ peraturan pembangunan.

8. Konsep Sistem Struktur dan Utilitas

a. Sistem struktur :

Pertimbangan-pertimbangan dalam menentukan sistem struktur :

- Fungsi ruang, berkaitan dengan luasan yang menentukan panjang bentang.

- Bentuk penampilan, yang menentukan sistem terpilih.

- Fungsi struktur, sebagai pengaman atau mengekspresikan karakter ruang.

- Kemudahan pelaksanaan, menyangkut kesederhanaan sistem struktur dan kesesuaian dengan daya dukung tanahnya.

- Material konstruksinya : dengan faktor-faktor keawetan dan ketahanan serta kekuatan, mendukung nilai estetik, kemudahan perawatan dan kemungkinan pelaksanaan.

b. Utilitas Bangunan

- Utilitas yang terpenting untuk bangunan pusat pemerintahan adalah : jaringan listrik, jaringan air minum, jaringan telepon.

- Semua fasilitas Utilitas di atas sudah dapat diambil dari fasilitas kawasan yang sudah tersedia.

DAFTAR PUSTAKA

- *Anthony J. Catanese*, Pengantar Perencanaan Kota, Erlangga, Jakarta, 1986.
- *Anthony J. Catanese*, Pengantar Arsitektur, Erlangga, Jakarta, 1986.
- *Amos Rapoport*, Asal Usul Budaya Pemukiman Melalui Pengantar Perencanaan Kota, Erlangga, Jakarta 1986, hal 43.
- *J. Douglas Porteous*, Environment & Behavior, Addison Westy Publishing Company, hal 99.
- *Bakti Setiawan*, Tugas Akhir. Jurusan Teknik Arsitektur Fakultas teknik UGM, 1983.
- Buku Repelita V kabupaten Dati II Musi Banyuasin 1990/1991 - 1992/1993.
- Buku Rencana Umum Tata Ruang Kota Sekayu.
- *Geoffrey Broadbent*, Signs, Symbols, and Architecture, John Wiley & Sons Ltd, 1980.
- *Hendraningsih*, Peran Kesan dan Pesan Bentuk-bentuk Arsitektur, Djembatan, Jakarta, 1982.
- *Isaac-Arg*, Pendekatan Kepada Perancangan Arsitektur, Intermatra, Bandung, 1986.
- *J. Douglas Porteus*, Environment & Behavior, Addison Wesley Publishing Company.
- *John Ormsbee Simonds*, Lanscape Architecture, FW Dodge Corporation, New York, 1961.
- *Kevin Lynch*, The City Image and Its Elements.
- *K. Kwantjik Saleh SH*, UU RI no. 5 th 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Majalah ASRI, Edisi Juni 1983.
- *Robert M. Beckley*, Urban Design melalui Pengantar Perencanaan Kota, Erlangga, Jakarta 1986, hal 93.
- *Soedjono D. SH*, Segi-segi Hukum Tentang Tata Bina Kota di Indonesia, PT Karya Nusantara, Bandung, 1978.

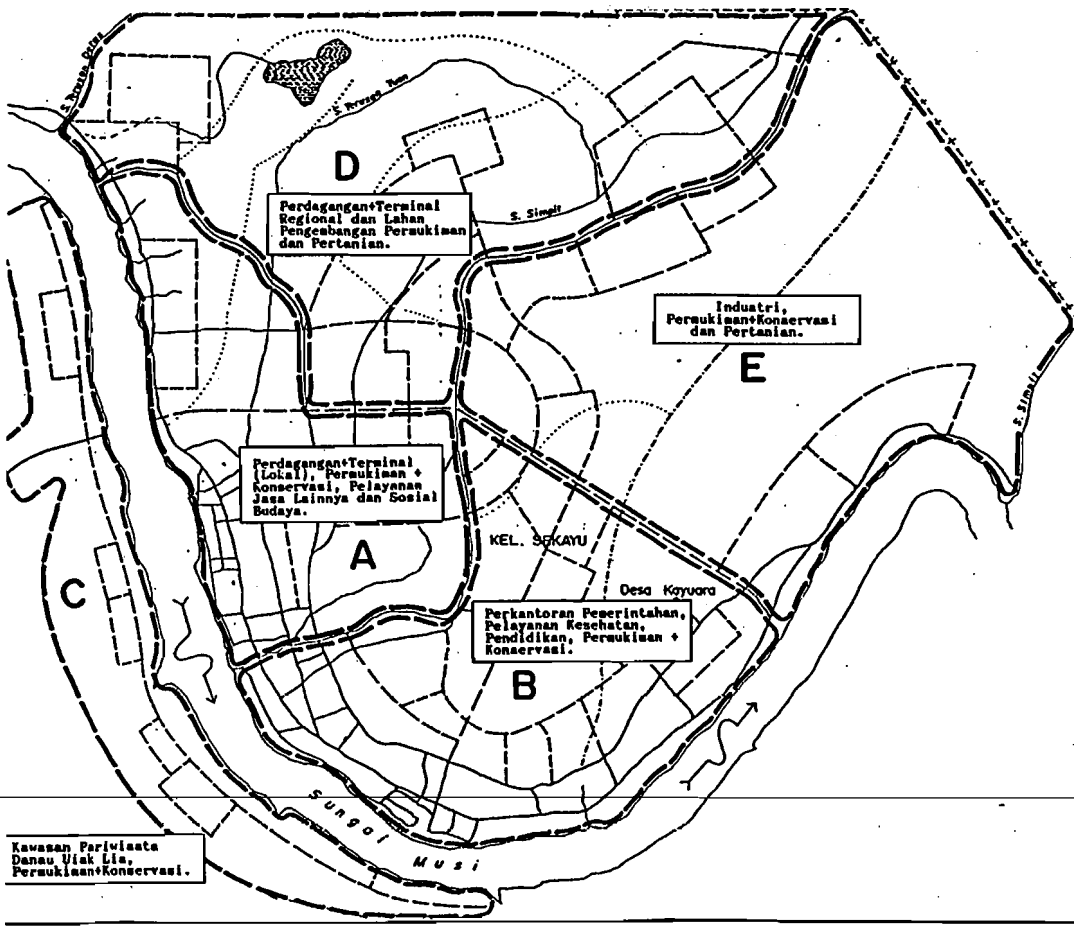
- *S. Pamudji MPA, Prof, Drs, Pembinaan Perkotaan di Indonesia, Pt Bina Aksara, Jakarta, 1985.*

- *Yoshinobu Ashihara, Perancangan Eksterior dalam Perancangan Arsitektur, Abdi Widya, Bandung, 1986.*

LAMP IRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- Peta pembagian wilayah pengembangan kota Sekayu.
 - Peta sistem jaringan drainase kota Sekayu.
 - Struktur organisasi pemerintahan Kabupaten Dati II Musi Banyuasin Sumatera Selatan.
 - Struktur organisasi Bappeda Dati II Musi banyuasin Sumatera Selatan.
 - Struktur organisasi Kantor Sospol Dati II Musi banyuasin Sumatera Selatan.
 - Struktur organisasi BP-7 Dati II Musi banyuasin Sumatera Selatan.
 - Struktur organisasi Mawil Hansip Dati II Musi banyuasin Sumatera Selatan.
 - Pola pembangunan pengelolaan kota Sekayu.
 - Daftar perhitungan luasan ruang Kantor Bupati, Gedung Pertemuan/Pendopo dan ruang parkir.
-



Kawasan Pariwisata
Danau Ulu Lina,
Perumahan+Konservasi.

KOTA SEKAYU

Proyek :
**RENCANA UMUM
TATA RUANG KOTA**

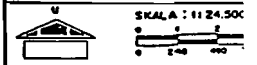
Gambar : 4.1
PEMBAGIAN BWK

LEGENDA :

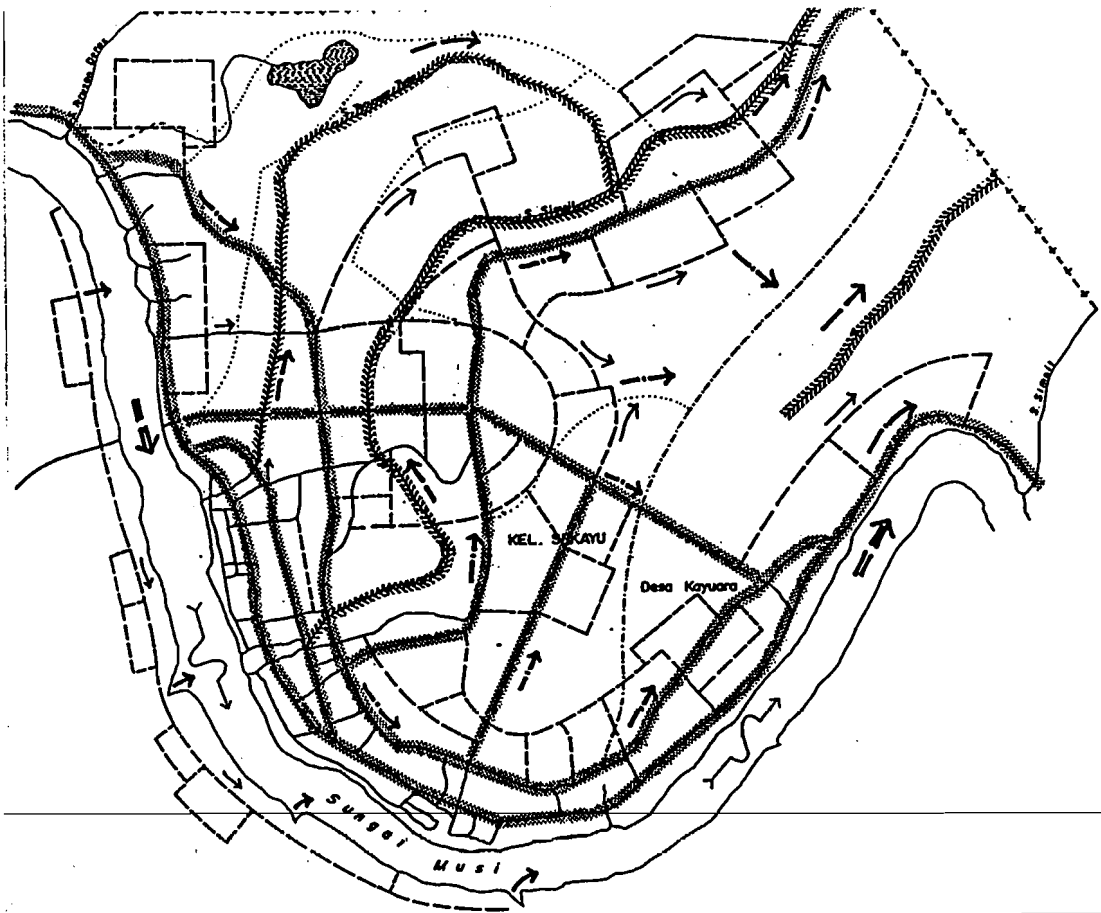
Batas BWK.

Sumber :

Dibuat :			
Diperiksa :			
Diketahui :			
Ditetujui :			
Tanggal	No. Proyek	Jml Lembar	No. Ls



**PEMERINTAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT
MUSI BANYUASIN**



KOTA SEKAYU

**RENCANA UMUM
TATA RUANG KOTA**

Contoh - 3.10

INDIKASI SISTEM DRAINASE

LEGENDA :

- Drainase Alam.
- Drainase Buatan.
- Drainase Utama.
- Cabang Utama Primer.
- Cabang Utama Sekunder.
- Arah Setempat.

Sumber :

Dibuat oleh :

Ditahun :

Ditertajut :

Tanggal	No. Proyek	Jml. Lembar	No. Lembar

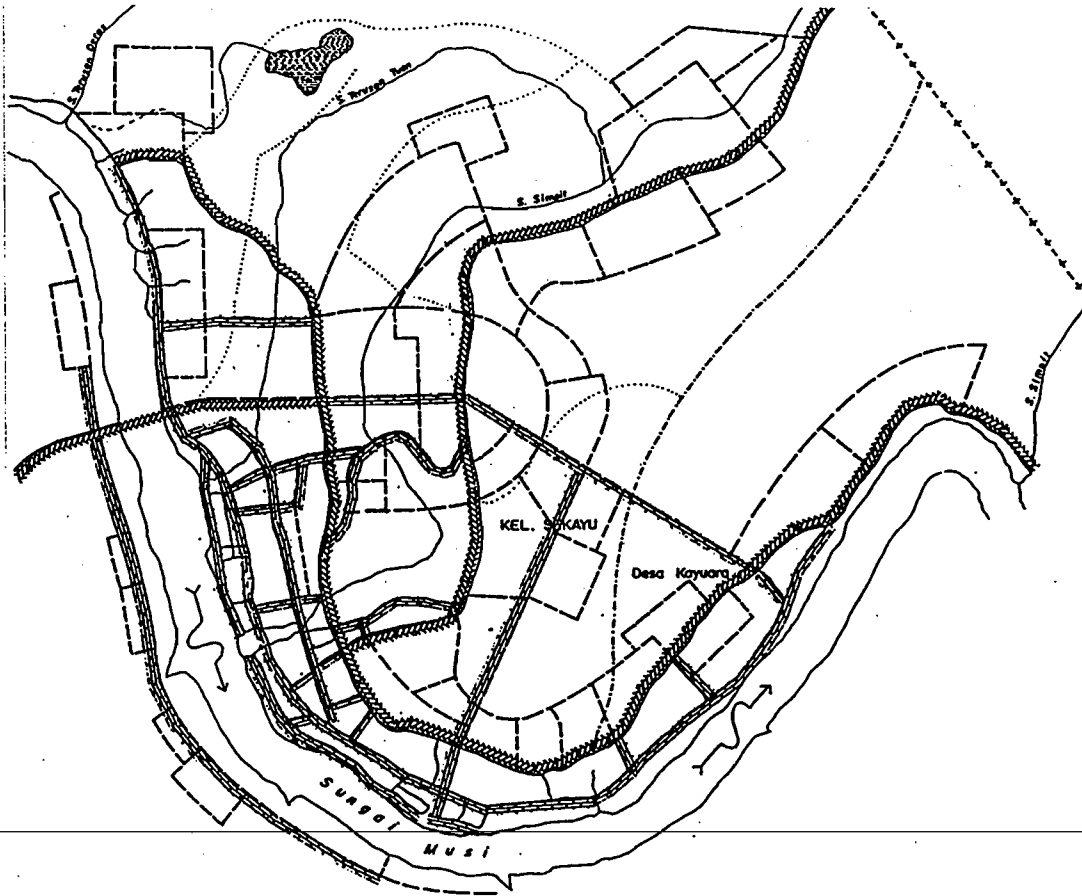
--	--	--	--



SKALA : 1 : 25,000



**PEMERINTAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II
MUSI BANYUASIN**





**RENCANA UMUM
TATA RUANG KOTA**

Gambar : 3.7

INDIKASI JARINGAN LISTRIK

LEGENDA :

-  Jaringan Utama.
-  Jaringan Cabang/Pembagi.

Sumber :

Digambar :

Diperiksa :

Ditandatangani :

Dibuat pada :

Tanggal	No Proyek	Jml Lembar	No Lembar

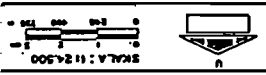
KOTA SEKAYU



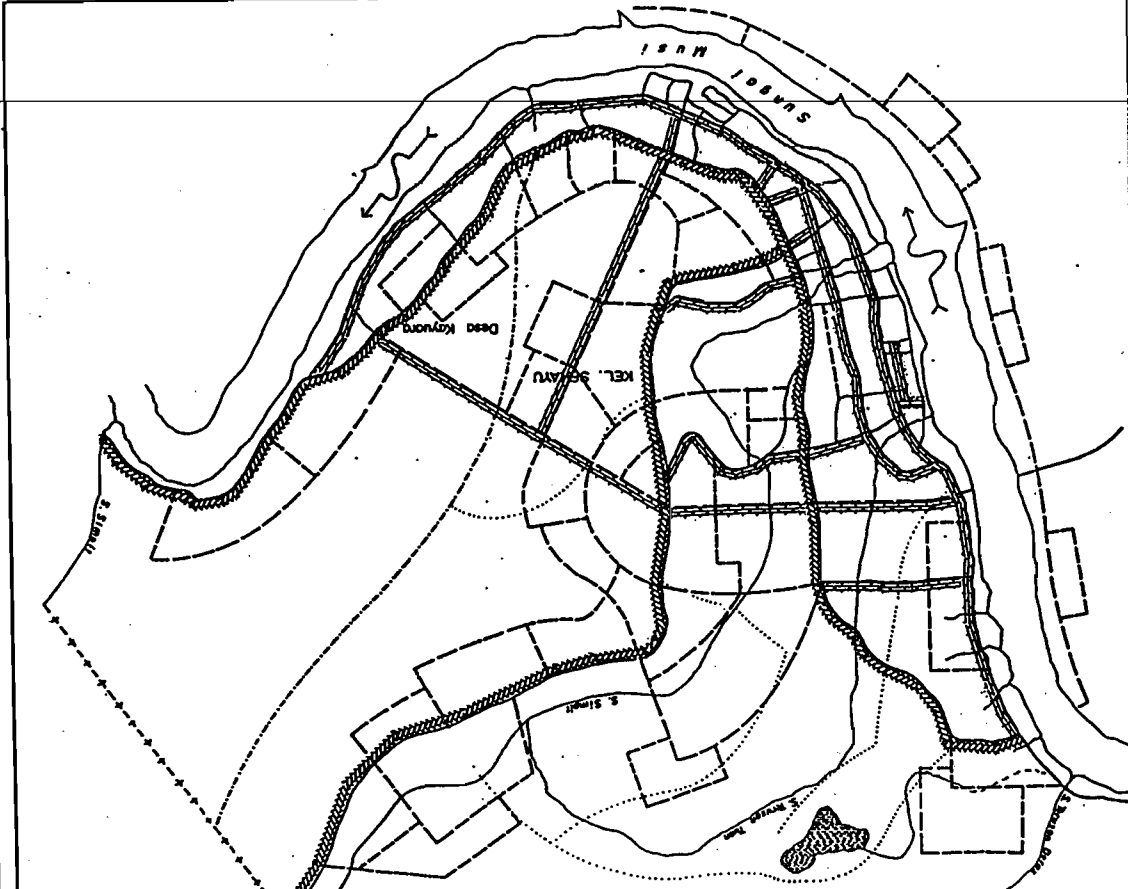
**PEMERINTAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II
MUSI BANYUASIN**

KOTA SEKAYU

PEMERINTAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II
HUSI BANYUASIN



No. Lembar	No. Lembar	No. Lembar	No. Lembar	No. Lembar	No. Lembar



LEGENDA :

- Jaringan Utama.
- Jaringan Cabang/Pendagi.

REKAM JARINGAN TELEPON
TATA RUANG KOTA
KEMERANGAN UMUM
Gedung : 30



KOTA SEKAYU

SKALA: 1:25.000

No. Proyek	No. Lembar	No. Lembar

Disusun oleh :
 Disetujui oleh :
 Dibuat pada :
 Diangkat pada :
 Nomor :

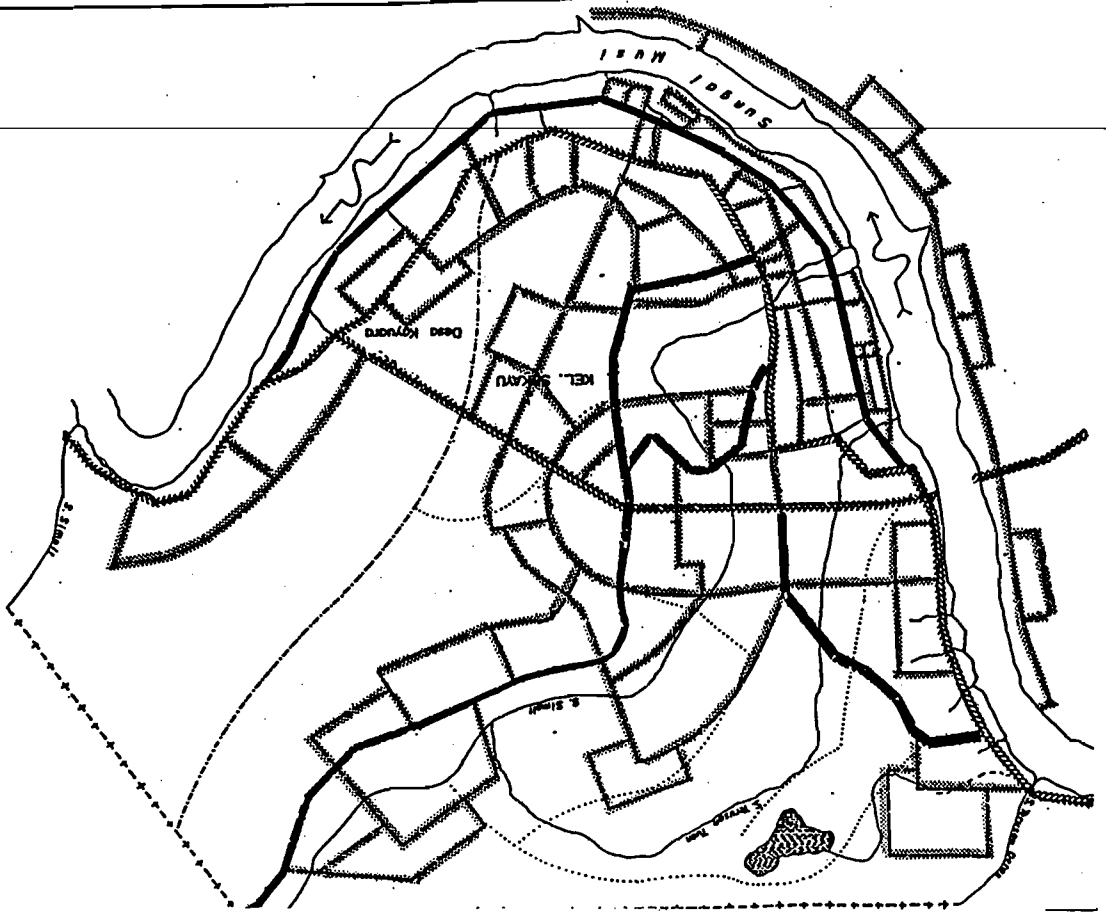
LEGENDA :

- Jaringan Pembagi
- Jaringan Cabang Utama
- Jaringan Utama

INDIKASI JARINGAN AIR MINUM

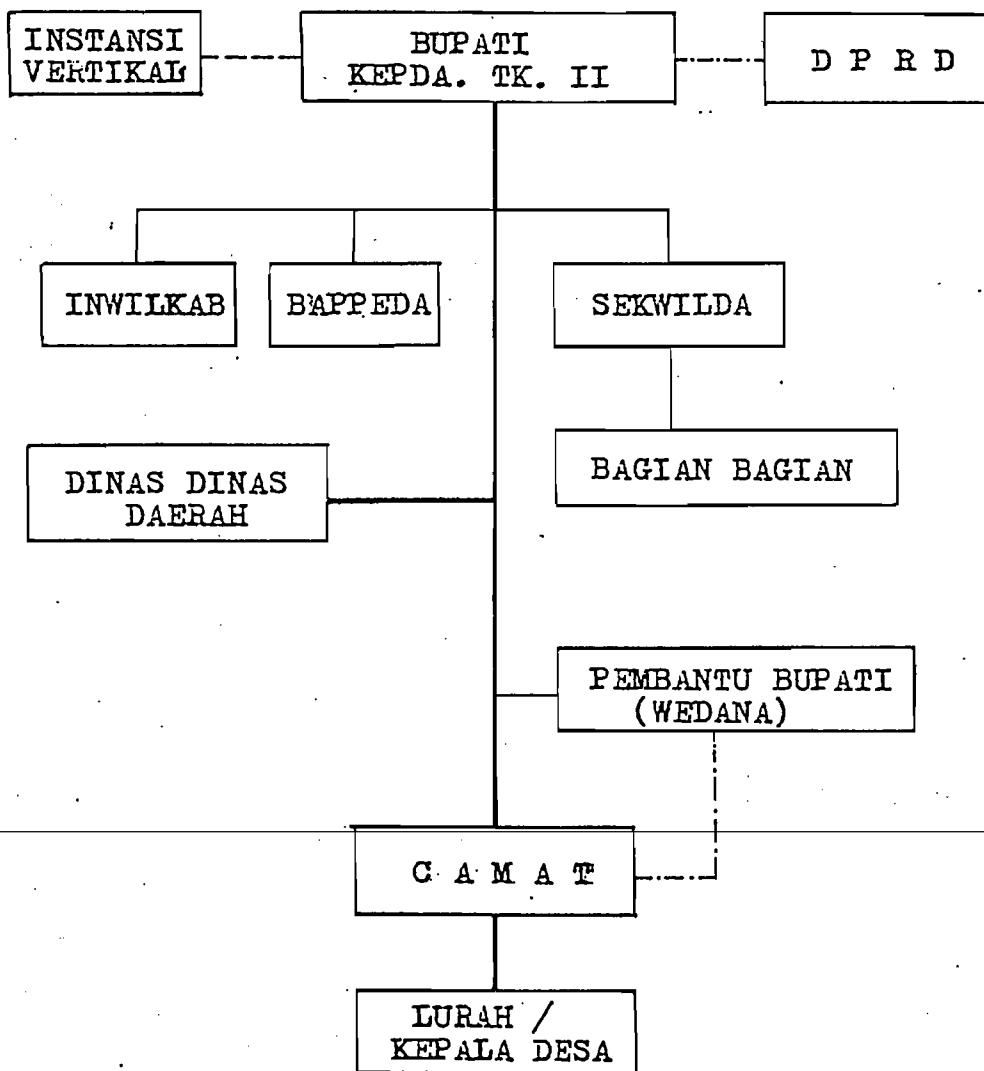
RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA

Code : 2.9



STRUKTUR ORGANISASI

PEMERINTAH DATI II MUSI BANYUASIN

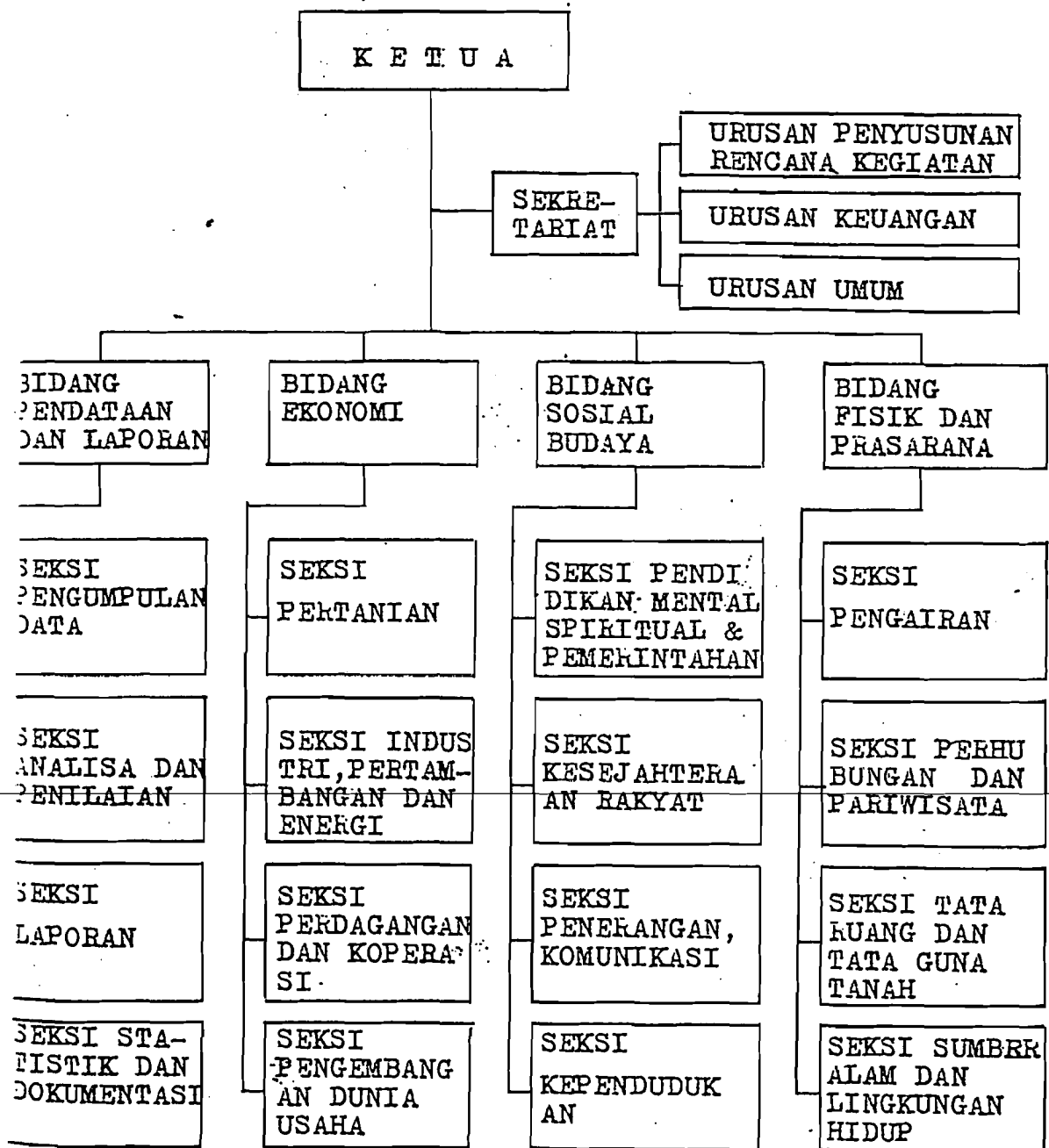


Keterangan :

- garis perintah
- - - - - garis koordinatif
- garis staf
- - - - - garis konsultatif

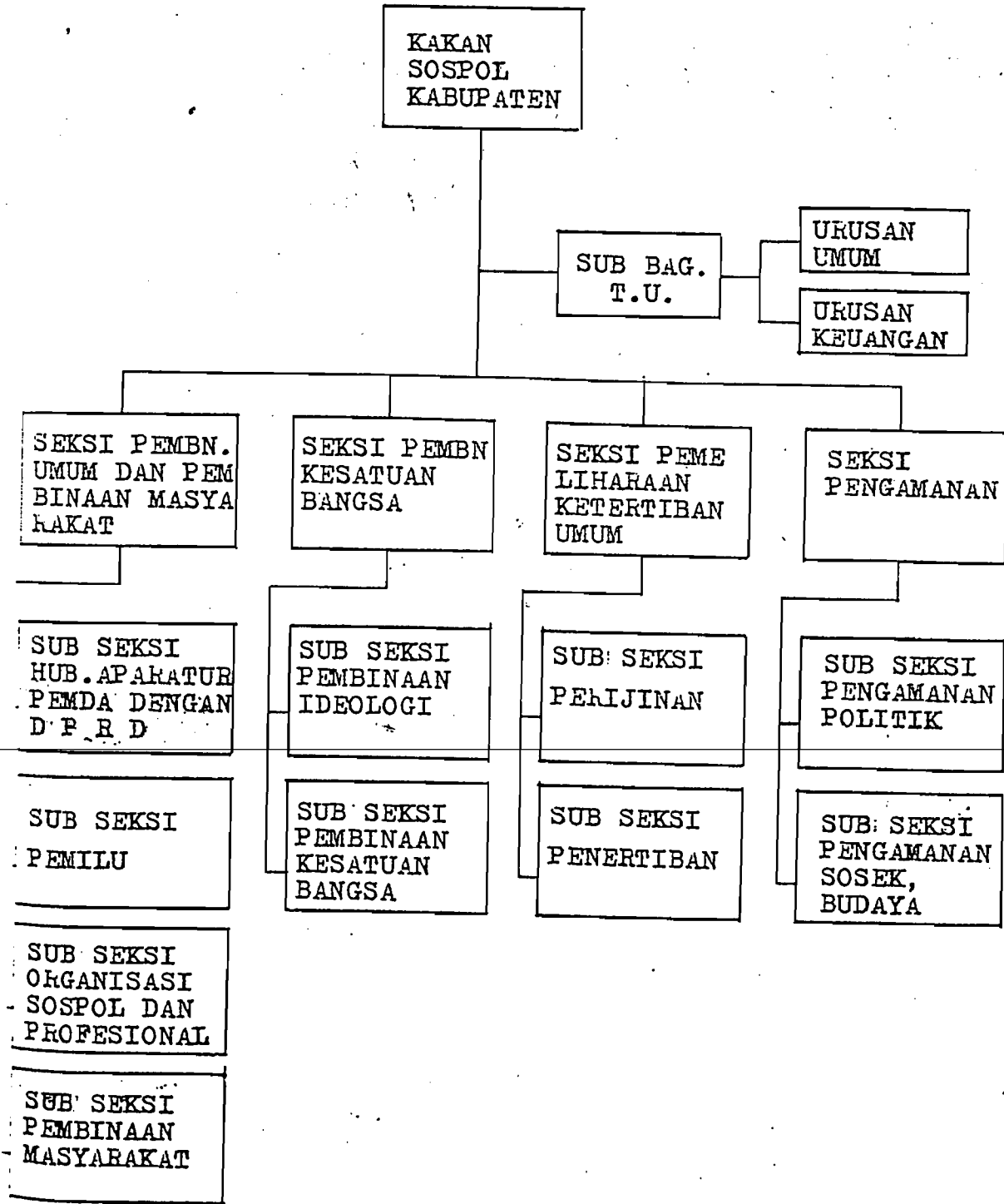
STRUKTUR ORGANISASI

BAPPEDA DATI II MUSI BANYUASIN



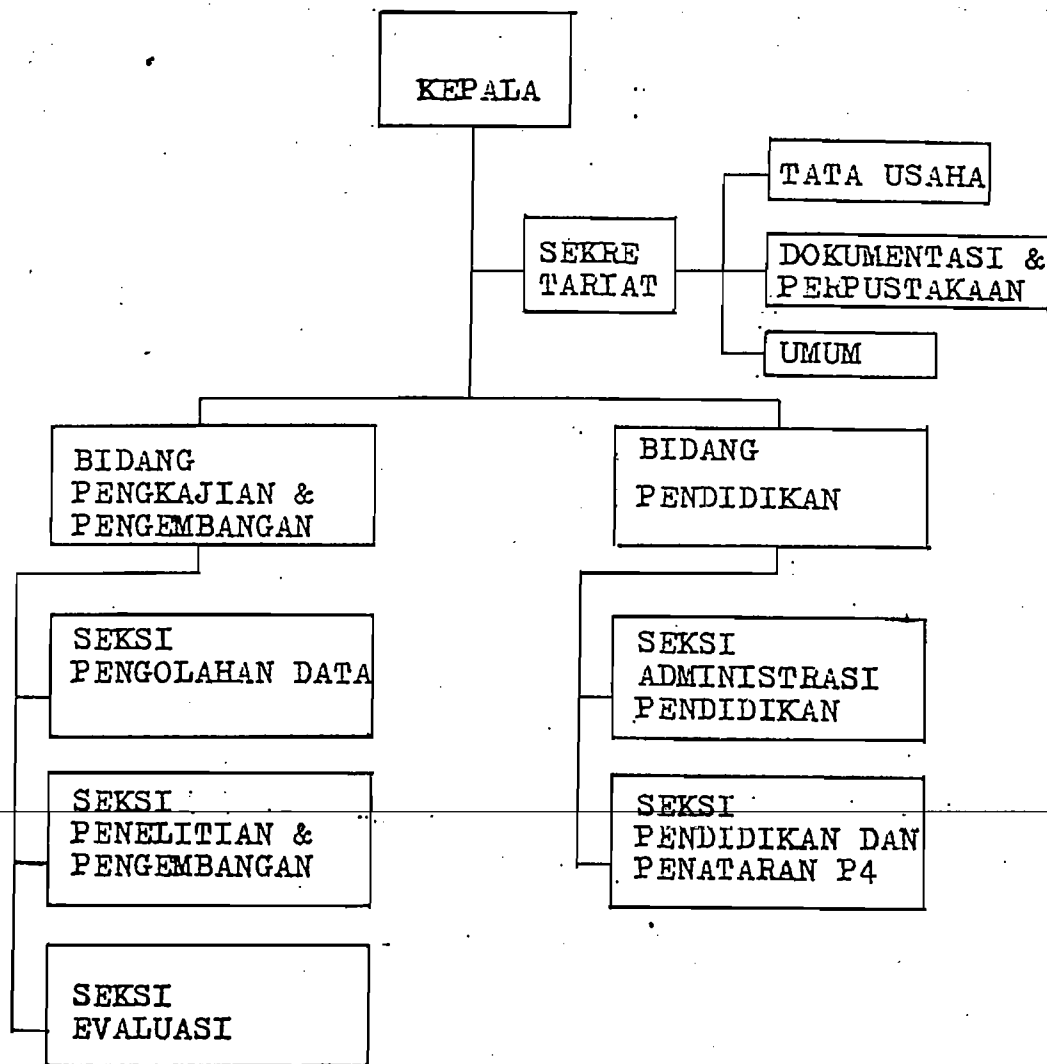
STRUKTUR ORGANISASI

KANTOR SOSPOL DATI II MUSI BANYUASIN



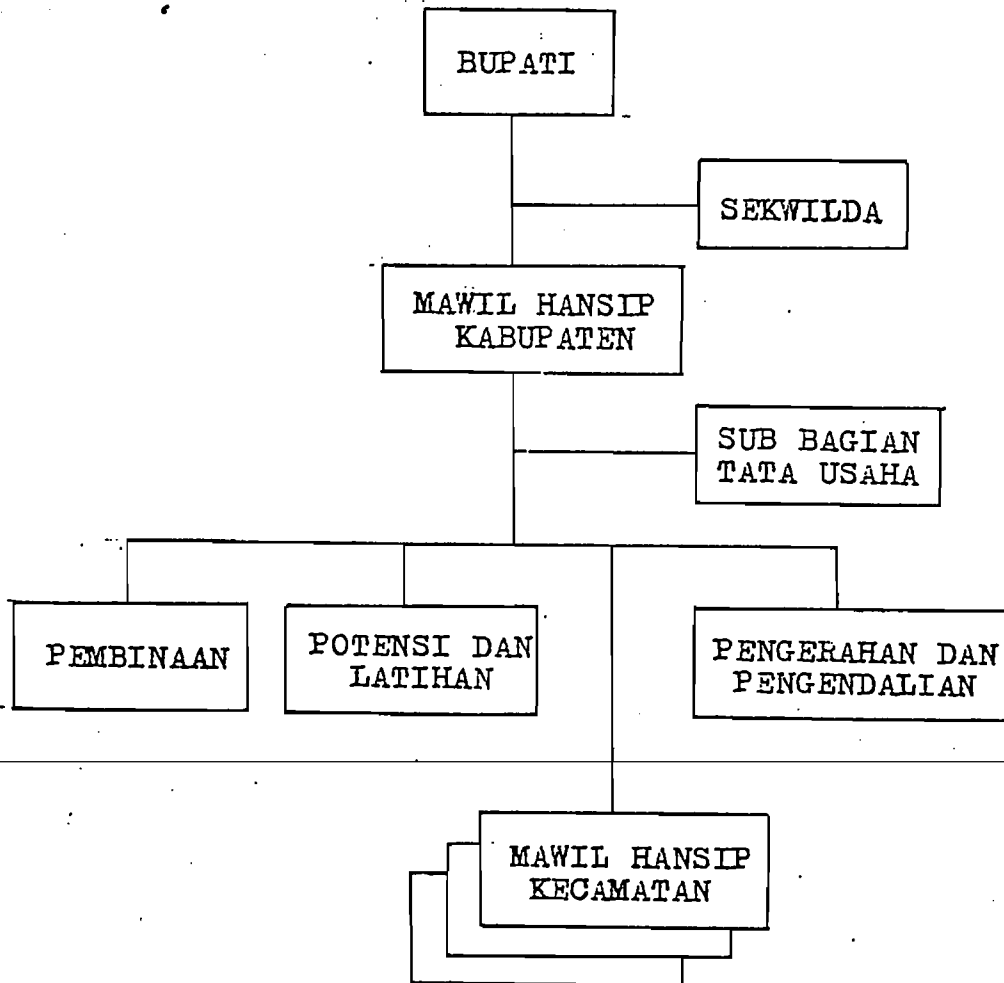
STRUKTUR ORGANISASI

BP 7 DATI II MUSI BANYUASIN

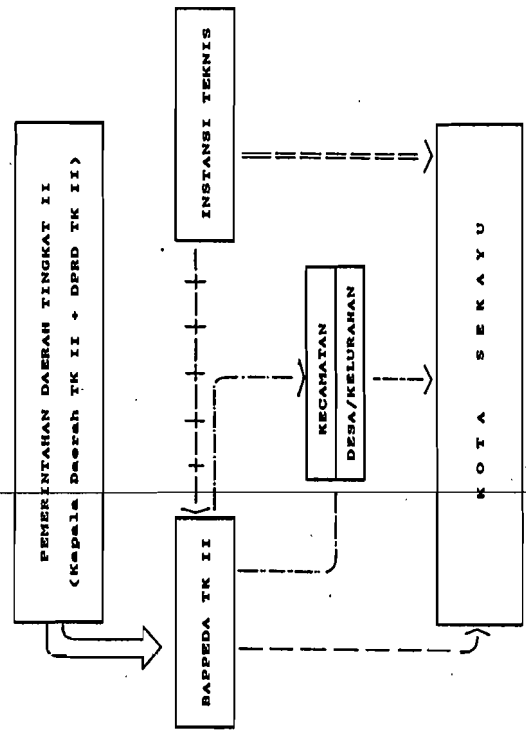


STRUKTUR ORGANISASI

MAWIL HANSIP DATI II MUSI BANYUASIN



TABEL 5.1
POLA PENGELOLAAN PEMBANGUNAN KOTA



- ↑↑↑ Bertanggungjawab.
- ↑↑↑ Pengelolaan Kebijakan Pembangunan.
- ↑↑↑ Pembekian Maksud Teknik dan Koordinasi.
- ↑↑↑ Pelaksanaan Pembangunan Teknik Sektoral.
- ↑↑↑ Penunjukkan Pengelolaan Sehari-hari.
- ↑↑↑ Pengelolaan Sehari-hari.
- ↑↑↑ Pelaporan Hasil Pengelolaan Sehari-hari.

1. a. Kelompok Ruang Bupati

No.	Nama Ruang	Jumlah Personal	Ratio (M2/Org)	Luas Rg. (M2)	Total (M2)
1.	R. kerja Bupati	1	40	40	
2.	R. Ajudan + Staf	3	10	30	
3.	R. Rapat	40	2,5	100	
4.	R. Tunggu	10	1,5	15	
5.	R. Tamu	20	2,5	50	
6.	R. Istirahat	-	-	50	
	Jumlah			265	
7.	R. Service + Sirkulasi = $25\% \times \frac{25}{100} \times 265 =$			70	
					335

b. Kelompok Ruang Sekretaris Wilayah Daerah

No.	Nama Ruang	Jumlah Personal	Ratio (M2/Org)	Luas Rg. (M2)	Total (M2)
1.	R. kerja	1	30	30	
2.	R. Ajudan	1	10	10	
3.	R. Rapat	16	2,5	40	
4.	R. Tunggu	6	1,5	9	
5.	R. Tamu	12	2,5	30	
6.	R. Istirahat	-	-	20	
	Jumlah			139	
7.	R. Service + Sirkulasi = $25\% \times \frac{25}{100} \times 139 =$			35	
					174

c. Kelompok Ruang Asisten Sekretaris Bidang Pemerintahan

No.	Nama Ruang	Jumlah Personal	Ratio (M2/Org)	Luas Rg. (M2)	Total (M2)
1.	R. Ass Sekretaris	1	24	24	
	R. Staf Ass. Sek	4	6	24	
2.	R. Kabag Penth.	1	16	16	
	R. Kasubag Penth.	5	10	50	
	R. Adm.Bag.Penth.	39	4	156	
3.	R. Kabag Hukum, Organisasi, Tata Lingkungan	1	16	16	
	R. Kasubag.	5	10	50	
	R. Adm.Bag.Hukum, Ortak	25	4	100	
	R. Kabag.Humas	1	16	16	
4.	R. Kasubag.Humas	3	10	30	
	R. Adm.Bag.Humas	12	4	48	
	R. Rapat	16	1,5	24	
	R. Tunggu	4	2,5	10	
	R. Arsip			13	
	R. Istirahat	-	-	13	
6.	Jumlah			590	
	R. Service + Sirkulasi = 25 % $\frac{25}{100} \times 590 =$			148	
					738

d. ~~Kelempok Ruang Asisten Sekretaris Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Kesra.~~

No.	Nama Ruang	Jumlah Personal	Ratio (M2/Org)	Luas Rg. (M2)	Total (M2)
1.	R. Ass Sekretaris	1	24	24	
	R. Staf Ass. Sek	4	6	24	
2.	R. Kabag Perekonomian	1	16	16	
	R. Kasubag.	3	10	30	
3.	R. Adm.Bag.Perekonomian	52	4	208	
	R. Kabag Pemb.	1	16	16	
	R. Kasubag. Pemb.	3	10	30	
	R. Adm.Bag.Pemb.	44	4	176	
4.	R. Kabag. Kesra	1	16	16	
	R. Kasubag	3	10	30	
	R. Adm.Bag.Kesra	36	4	144	
5.	R. Rapat	16	1,5	40	
	R. Tunggu	4	2,5	10	
	R. Arsip	-	-	13	
	R. Simpan	-	-	13	
			Jumlah	800	
6.	R. Service + Sirkulasi = 25 % $\frac{25}{100} \times 800 =$			200	
					1000

e. Kelompok Ruang Asisten Sekretaris Bidang Umum

No.	Nama Ruang	Jumlah Personal	Ratio (M2/Org)	Luas Rg. (M2)	Total (M2)
1.	R. Ass Sekretaris	1	24	24	
	R. Staf Ass. Sek	4	6	24	
2.	R. Kabag Keu.	1	16	16	
	R. Kasubag. Keu.	3	10	30	
	R. Adm.Bag. Keu.	79	4	316	
3.	R. Kabag Kepeg.	1	16	16	
	R. Kasubag.Kepeg.	3	10	30	
	R. Adm.Bag.Kepeg.	58	4	232	
4.	R. Kabag. Umum + Protokol	1	16	16	
5.	R. Rapat	16	1,5	40	
	R. Tunggu	4	2,5	10	
	R. Arsip	-	-	22	
	R. Simpan	-	-	22	
			Jumlah	1384	
6.	R. Service + Sirkulasi = $25\% \times \frac{25}{100} \times 1384 =$	25		200	
					1730

2. a. Kelompok Ruang Pertemuan/Balai Kesenian

No.	Nama Ruang	Jumlah Personal	Ratio (M2/Org)	Luas Rg. (M2)	Total (M2)
1.	Hall Utama	400	1,5	600	
2.	Belakang Panggung, Pantry, Gudang, Toilet		$= 20 \% \frac{20}{100} \times 600 = 120$		
			Jumlah	= 720	
2.	R. Service + Sirkulasi		$= 25 \% \frac{25}{100} \times 720 = 180$		
					900

b. Kelompok Ruang Fasilitas Umum

No.	Nama Ruang	Jumlah Personal	Ratio (M2/Org)	Luas Rg. (M2)	Total (M2)
1.	Gallery	-	-	100	
2.	Kantin	100	1	100	
3.	Musholla	50	2	100	
4.	Koperasi	-	-	100	
5.	R. Olahraga	-	-	100	
6.	Dharma Wanita	-	-	80	
			Jumlah	580	
7.	R. Service + Sirkulasi		$= 25 \% \frac{25}{100} \times 580 =$	145	
					725



c. Kelompok Ruang Fasilitas Penunjang

No.	Nama Ruang	Jumlah Personal	Ratio (M2/Org)	Luas Rg. (M2)	Total (M2)
1.	R. Pola/Duta	100	2	200	
2.	R. Komputer	-	-	150	
3.	R. Pusat Arsip	-	-	120	
4.	R. Pers	50	1,5	75	
5.	R. Jaga	-	-	20	
6.	R. Cetak	-	-	10	
7.	R. Perpustakaan	-	-	100	
8.	R. Pengemudi	-	-	20	
9.	Balai Eksekutif	-	-	60	
			Jumlah	755	
7.	R. Service + Sirkulasi = 25 %	25	$\frac{25}{100} \times 755 =$	189	
					944

- Kebutuhan luas ruang parkir untuk Kantor Bupati seluas =

$$(335 + 174 + 738 + 1001 + 1730) = 3977 \text{ M2 adalah}$$

$$= \frac{3977}{100} \times 1 \text{ mobil} = 40 \text{ mobil.}$$

$$\text{Luas ruang parkir minimum} = 40 \times 15 \text{ M2} = 600 \text{ M2.}$$

- Kebutuhan luas ruang parkir untuk Pendopo Kab/Gedung

$$\text{Pertemuan, seluas} = (900 + 725 + 944) = 2569 \text{ M2 adalah}$$

$$= \frac{2569}{100} \times 1 \text{ mobil}$$

$$\text{Luas ruang parkir minimum} = 26 \times 15 \text{ M2} = 390 \text{ M2.}$$